



**PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR 15 TAHUN 2017**

TENTANG

**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH TAHUN 2017**

**PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
TAHUN 2017**



**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR 15 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017, menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah daerah beserta pergeseran pagu kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan, maka perlu dilakukan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 718);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2006-2025; (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2006, Nomor 10);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2012 - 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2013, Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016, Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2017.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi;
3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat;
4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah Rencana Pemerintahan Tahunan Daerah yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah periode untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

Perubahan RKPD dilakukan berdasarkan :

- a. hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah maupun keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah.
- b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau
- c. keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- d. pergeseran pagu kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

BAB II SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Pasal 3

- (1) Perubahan RKPD Tahun 2017 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan,

memuat/menjelaskan maksud, tujuan, dan dasar pertimbangan perubahan yang disertai dengan gambaran tentang perubahan kerangka ekonomi daerah.

Bab II : Evaluasi Hasil RKPD Sampai Dengan Triwulan II, memuat kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun n-1 sampai dengan Triwulan II tahun berjalan.

Bab III : Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah dalam Perubahan RKPD, memuat kegiatan lanjutan tahun sebelumnya, pergeseran kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan.

Bab IV : Penutup,

memuat hal-hal yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan.

- (2) Uraian secara rinci Perubahan RKPD Tahun 2017 sebagaimana dimaksud ayat (1) dimuat dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Perubahan RKPD Tahun 2017 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digunakan sebagai :

- a. pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja SKPD Tahun 2017).
- b. pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dalam menyusun Perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Perubahan RAPBD) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2017.

Pasal 5

Dalam rangka menyusun Perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud dalam pasal 4) huruf b Perubahan RKPD Tahun 2017 menjadi pedoman dalam :

- a. penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2017.
- b. pembahasan Perubahan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (Perubahan RKA-SKPD) Tahun Anggaran 2017.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal, 7 Agustus 2017

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,


NURHIDAYAH

Diundangkan di Pangkalan Bun
pada tanggal, 7 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT


MASRADIN

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2017
NOMOR : 15

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, serta atas perkenan-Nya kita dapat menyelesaikan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017.

Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017, disusun dengan berpedoman pada RPJP Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2006-2025 dan mengacu pada RPJMN Tahun 2015 - 2019, RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021, mengacu pada pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional dalam RKP Tahun 2017, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017, serta mensinergikan perencanaan dengan melalui pendekatan politik, pendekatan teknokratik dan pendekatan partisipatif serta pendekatan secara *bottom-up* dan *top-down*.

Sesuai fungsinya, dokumen RKPD Perubahan merupakan dokumen perencanaan teknis operasional tahunan. Oleh karena itu perannya sangat penting dalam menentukan arah perkembangan pembangunan daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun, serta menjadi pedoman dalam Penyusunan KUA dan PPAS Perubahan serta RAPBD Perubahan. Oleh karena itu semua Badan/Dinas/Unit Satuan Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat harus mempedomani serta melakukan langkah-langkah sinkronisasi/memaduserasikan rencana program hingga pelaksanaannya.

Pada kesempatan ini kami juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah berpartisipasi dalam proses penyusunan dokumen RKPD Perubahan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017 ini.

Pangkalan Bun, Agustus 2017

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT



NURHIDAYAH

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Dasar Penyusunan	I-3
1.3 Maksud, Tujuan, dan Dasar Pertimbangan Perubahan	I-5
1.3.1 Maksud	I-5
1.3.2 Tujuan.....	I-5
1.3.3. Dasar Pertimbangan Perubahan.....	I-6
1.4 Gambaran Perubahan Kerangka Ekonomi Daerah	I-7
 BAB II EVALUASI HASIL RKPD TAHUN 2017 KABUPATEN	
 KOTAWARINGIN BARAT SAMPAI DENGAN TRIWULAN KEDUA.	II-1
2.1 Pengantar	II-1
2.2 Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan Berdasarkan SKPD....	II-1
 BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH	
 DALAM PERUBAHAN RKPD	III-1
3.1 Perubahan Pendapatan	III-1
3.2 Perubahan Belanja.....	III-3
3.3 Perubahan Pembiayaan.....	III-5
3.4 Perubahan Anggaran Berdasarkan SKPD.....	III-6
 BAB IV PENUTUP 	IV-1

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Perkembangan dan Prediksi Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2015 – 2017	I-8
Tabel 2.1	Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.....	II-2
Tabel 2.2	Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas Kesehatan	II-6
Tabel 2.3	Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program RSUD Sultan Imanuddin	II-10
Tabel 2.4	Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	II-11
Tabel 2.5	Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman.....	II-15
Tabel 2.6	Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	II-17
Tabel 2.7	Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	II-19
Tabel 2.8	Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Badan Penanggulangan Bencana Daerah.....	II-21
Tabel 2.9	Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas Sosial.....	II-24
Tabel 2.10	Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	II-26
Tabel 2.11	Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program DP3A, DALDUK KB	II-28
Tabel 2.12	Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program DKP	II-31
Tabel 2.13	Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program DLH	II-33
Tabel 2.14	Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Disdukcapil	II-36
Tabel 2.15	Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas PMD	II-38
Tabel 2.16	Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas Perhubungan	II-40
Tabel 2.17	Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	II-43
Tabel 2.18	Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Disperindagkop UKM..	II-45
Tabel 2.19	Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.....	II-49
Tabel 2.20	Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas Kepemudaan dan Olah Raga.....	II-51
Tabel 2.21	Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.....	II-53
Tabel 2.22	Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas Perikanan	II-55
Tabel 2.23	Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas Pariwisata	II-57
Tabel 2.24	Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas TPHP	II-59
Tabel 2.25	Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.....	II-62

Tabel 2.26	Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Sekretariat Daerah.....	II-64
Tabel 2.27	Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Sekretariat DPRD	II-68
Tabel 2.28	Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Inspektorat.....	II-70
Tabel 2.29	Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Kecamatan Arut Selatan	II-72
Tabel 2.30	Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Kecamatan Arut Utara	II-74
Tabel 2.31	Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Kecamatan Kumai	II-75
Tabel 2.32	Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Kecamatan Kotawaringin Lama.....	II-77
Tabel 2.33	Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Kecamatan Pangkalan Lada.....	II-79
Tabel 2.34	Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Kecamatan Pangkalan Banteng	II-80
Tabel 2.35	Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program BAPPEDA.....	II-82
Tabel 2.36	Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program BPKAD	II-85
Tabel 2.37	Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Bapenda	II-87
Tabel 2.38	Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program BKPP.....	II-89
Tabel 2.39	Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Belanja Langsung SKPD	II-91
Tabel 3.1	Proyeksi Perubahan Penerimaan Pendapatan Daerah Tahun 2017	III-1
Tabel 3.2	Proyeksi Perubahan Komponen Pendapatan Asli Daerah Tahun 2017.....	III-2
Tabel 3.3	Proyeksi Perubahan Komponen Dana Perimbangan Tahun 2017	III-2
Tabel 3.4	Proyeksi Perubahan Komponen Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2017.....	III-3
Tabel 3.5	Proyeksi Perubahan Belanja Daerah Tahun 2017.....	III-4
Tabel 3.6	Proyeksi Perubahan Pembiayaan Daerah Tahun 2017	III-5
Tabel 3.7	Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi Tahun Anggaran 2017	III-6

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah RKPD merupakan pelaksanaan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menjadi salah satu rangkaian dari dokumen perencanaan pembangunan daerah. Dokumen RKPD merupakan dokumen perencanaan yang penyusunannya mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Dalam kerangka perencanaan pembangunan daerah, RKPD mempunyai fungsi pokok sebagai berikut :

1. Menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan, karena memuat seluruh kebijakan publik;
2. Menjadi pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), karena memuat arah kebijakan pembangunan daerah satu tahun; dan
3. Menciptakan kepastian kebijakan, karena merupakan komitmen pemerintah daerah.

Perencanaan pembangunan pada tingkat kabupaten/kota harus sejalan dengan proses penyusunan perencanaan pada tingkat nasional maupun provinsi. Penyusunan RKPD Perubahan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017 merupakan pelaksanaan tahun pertama dari RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017 - 2022.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Pasal 25, “RKPD merupakan pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara”, sehingga RKPD sebagai dokumen perencanaan operasional tahunan menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Seiring dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah, terjadi perubahan paradigma pemerintahan dari sentralisasi menjadi desentralisasi, dimana hal ini menjadi angin segar bagi Pemerintah Daerah di Indonesia termasuk bagi Pemerintah Kabupaten

Kotawaringin Barat. Perubahan tersebut akan menjadi peluang Kabupaten Kotawaringin Barat dalam mengoptimalkan kondisi atau potensi yang ada.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2017 dijelaskan bahwa RKPD Perubahan Tahun 2017 dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya pada tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, yang meliputi :

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau
3. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
4. Pergeseran kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan semester satu tahun berjalan ini telah ditemukan berbagai kondisi yang layak dijadikan dasar pertimbangan untuk melakukan perubahan atas dokumen RKPD Tahun 2017 Kabupaten Kotawaringin Barat.

Kondisi ini diperoleh dari hasil evaluasi atas kinerja pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan triwulan kedua tahun 2017, dimana beberapa poin yang ditemukan, antara lain sebagai berikut :

1. Perkembangan keadaan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah yang berdampak terhadap pagu yang mengakibatkan terjadinya penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, penambahan atau penghapusan kegiatan;
2. Faktor lain yang mengakibatkan perlunya dilakukan pergeseran kegiatan antar SKPD, perubahan lokasi dan/atau kelompok sasaran, dan penghapusan kegiatan;
3. Adanya kegiatan pada tahun 2016 yang belum dapat diselesaikan, sehingga harus dilanjutkan pada tahun 2017 namun belum dimasukkan dalam dokumen RKPD atau APBD tahun 2017; dan/atau

4. Kegiatan baru yang harus ditampung dalam RKPD Perubahan Tahun 2017 sebagai upaya untuk mempercepat pencapaian visi dan misi daerah.

Sehubungan dengan hal diatas, maka perlu dilakukan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan Tahun 2017 Kabupaten Kotawaringin Barat. RKPD Perubahan Tahun 2017 ini dirasakan sangat penting untuk konsistensi dan keselarasan serta kesinambungan upaya pencapaian visi dan misi Kabupaten Kotawaringin Barat dengan lebih efisien dan efektif.

Pada sisi lain, penyusunan dokumen RKPD Perubahan Tahun 2017 ini merupakan pedoman bagi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan selanjutnya, yang meliputi Kebijakan Umum APBD Perubahan Tahun 2017, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun 2017, serta Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan Tahun 2017, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

1.2. Dasar Penyusunan

Penyusunan RKPD Perubahan Tahun 2017 Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan pada beberapa regulasi sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 718);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2006-2025; (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2006, Nomor 10);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2012 - 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2013, Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016, Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66).

1.3 Maksud, Tujuan dan Dasar Pertimbangan Perubahan

Maksud, tujuan, dan dasar pertimbangan dilakukannya RKPD Perubahan Tahun 2017 Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai berikut :

1.3.1 Maksud

RKPD Perubahan Tahun 2017 Kabupaten Kotawaringin Barat dimaksudkan sebagai upaya memenuhi kebutuhan daerah terhadap suatu perubahan atas dokumen perencanaan pembangunan daerah yang bersifat tahunan, yaitu Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 Kabupaten Kotawaringin Barat.

RKPD Perubahan Tahun 2017 Kabupaten Kotawaringin Barat sangat penting peranannya sebagai arah dan pedoman bagi segenap pemangku kepentingan (*stakeholders*) pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat untuk pelaksanaan pembangunan daerah dalam tahapan perubahan di tahun 2017.

RKPD Perubahan Tahun 2017 Kabupaten Kotawaringin Barat tetap menjadi bagian utuh dari upaya pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017 - 2022. RKPD Perubahan Tahun 2017 memuat dasar pertimbangan perlunya perubahan, hasil evaluasi pembangunan sampai triwulan kedua, dan perubahan atas program dan kegiatan yang harus dilakukan pada tahapan pembangunan tahun 2017.

1.3.2 Tujuan

RKPD Perubahan Tahun 2017 Kabupaten Kotawaringin Barat ditujukan untuk memberikan kerangka sistematis sebagai pedoman terhadap arah penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan

pelayanan kepada masyarakat yang dituangkan dalam bentuk kebijakan Perubahan APBD Tahun 2017.

Penyusunan RKPD Perubahan Tahun 2017 ini juga bertujuan untuk merangsang partisipasi publik dalam merencanakan, melaksanakan, mengawasi proses pembangunan. Secara lebih sistematis, tujuan penyusunan RKPD Perubahan Tahun 2017 Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai berikut :

1. Diperolehnya suatu dokumen perubahan rencana pembangunan tahunan yang sesuai dengan kebutuhan daerah dan perkembangan yang terjadi di daerah, dengan melihat sumber daya yang ada;
2. Diperolehnya dokumen perubahan atas program dan kegiatan yang menjadi upaya konkrit untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2017;
3. Tersedianya acuan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Perubahan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017 dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017, sebagai dasar dari penyusunan APBD Perubahan Tahun 2017 Kabupaten Kotawaringin Barat.

1.3.3 Dasar Pertimbangan Perubahan

RKPD Perubahan Tahun 2017 Kabupaten Kotawaringin Barat perlu dilakukan, didasarkan pada adanya hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan, yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

1. Adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
2. Adanya keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
3. Adanya pergeseran kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan;
4. Adanya kegiatan lanjutan Tahun 2016 dan/atau kegiatan baru/alternatif yang harus ditampung dalam RKPD Perubahan Tahun 2017;
5. Adanya keadaan luar biasa yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh persen);

6. Adanya ketentuan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang serta pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa penyusunan RAPBD berpedoman kepada RKPD, termasuk Perubahan RAPBD Tahun 2017.

1.4. Gambaran Perubahan Kerangka Ekonomi Daerah

Adanya berbagai perkembangan dan kecenderungan, khususnya pada aspek ekonomi, dapat menimbulkan rangkaian permasalahan dan tantangan selama pembangunan tahun berjalan, yang turut menyebabkan perlu dilakukannya perubahan terhadap RKPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017. Krisis ekonomi global yang dampaknya diperkirakan makin meluas di wilayah Eropa dan Amerika, masih akan berpotensi terhadap melemahnya perekonomian dunia pada tahun 2017. Kondisi tersebut semakin menjadi perhatian terkait dengan adanya kebijakan pembatasan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM), dan kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) yang diperkirakan dapat meningkatkan tekanan terhadap kondisi perekonomian di Indonesia.

Berkaca dari tahun lalu, pengaruh terbesar bagi ekonomi Indonesia di 2017 bisa jadi antara lain, yaitu pertama perlambatan ekonomi Tiongkok dan kedua masih rendahnya harga minyak. Bahasan pertama adalah pengaruh Tiongkok ke Indonesia. Sebagai mitra dagang terbesar Indonesia, perlambatan di Tiongkok berarti memberi pengaruh pada kegiatan ekspor. Ekonomi dunia juga mendapat pengaruh yang sama atas perlambatan ini. Melihat hal ini, tentunya pola ekspor Indonesia pun harus mulai diubah, dari barang mentah menjadi barang jadi/barang konsumsi. Kebijakan suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat juga pasti berpengaruh pada kondisi ekonomi dalam negeri, khususnya sektor keuangan. Hal ini tentunya harus kita antisipasi sehingga sektor keuangan Indonesia tetap dalam kondisi stabil. Pertumbuhan ekonomi Indonesia oleh Bank Dunia pada Tahun 2017 diprediksikan mencapai 5 - 5,4 %. Melemahnya pertumbuhan ekonomi disebabkan penyerapan anggaran pemerintah belum mampu mendorong konsumsi domestik.

Impor barang Kalimantan Tengah pada Tahun 2017 diperkirakan masih akan kembali meningkat sejalan dengan semakin tingginya permintaan barang-barang modal seperti mesin-mesin dan pesawat mekanik, dan benda-benda dari besi dan baja. Sementara dari sisi ekspor Kalimantan Tengah mengalami peningkatan terutama ekspor minyak nabati.

Kondisi perekonomian di Kalimantan Tengah pada umumnya, dan Kabupaten Kotawaringin Barat pada khususnya pada akhir tahun 2017 akan dipengaruhi oleh kondisi perekonomian dunia dan kondisi perekonomian nasional. Sejalan dengan kondisi tersebut, hal-hal yang masih menjadi tantangan perekonomian daerah di Kalimantan Tengah dan Kabupaten Kotawaringin Barat pada khususnya, adalah :

1. Berlakunya perdagangan bebas antara Asia Tenggara, China ACFTA 2010 dan *Asia Economic Community* (AEC) 2015;
2. Masih tingginya permintaan impor produk bahan baku industri;
3. Pengetatan kebijakan kuota subsidi BBM;
4. Pengaruh fluktuasi ekonomi global terhadap pertumbuhan ekonomi regional;
5. Keterlambatan pembangunan infrastruktur;
6. Alih fungsi lahan yang tidak sesuai peruntukan; dan
7. Kebijakan sektoral yang kurang sinkron.

Sejalan dengan berbagai tantangan tersebut, beberapa kondisi yang dapat menjadi peluang adalah :

1. Semakin meningkatnya peluang pasar ekspor;
2. Meningkatnya dukungan program CSR (*Corporate Social Responsibility*) dan PKBL (Program Kemitraan dan Bina Lingkungan);
3. Meningkatnya peluang investasi;
4. Mulai terbukanya kerjasama pemerintah dengan swasta;
5. Akselerasi dan komitmen pembangunan infrastruktur untuk mendukung pengembangan potensi wilayah seperti pelabuhan, pembangkit listrik dan rel kereta api.

Perkembangan kondisi perekonomian Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2015 – 2016 dan prediksi Tahun 2017, dapat dilihat pada Tabel 1.1 sebagai berikut :

Tabel 1.1.
Perkembangan dan Prediksi Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2015 - 2017

No.	Indikator	Tahun		
		2015	2016	2017*)
1.	PDRB atas dasar harga berlaku (juta Rp)	13.106.339	14.485.921	16.274.244,44
2.	PDRB atas dasar harga konstan (juta Rp)	10.112.714	10.699.938	11.428.780,27
3.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	7,32	5,81	6,00
4.	Inflasi (%)	4,06	4,08	4,00

5.	PDRB per kapita atas dasar harga berlaku (Rp)	47.010.000	50.520.000	54.910.000
6.	PDRB per kapita atas dasar harga konstan (Rp)	36.360.000	37.320.000	38.620.000
7.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	3,25	3,16	3,10
8.	Kemiskinan (%)	5,07	4,96	4,72

Sumber: BPS. Kotawaringin Barat Dalam Angka. 2016

Keterangan : *) Target RKPD berdasarkan target RPJMD 2012 - 2016 dan hasil analisis

Kegiatan investasi diperkirakan masih akan terus berkembang sejalan dengan komitmen Kabupaten Kotawaringin Barat untuk meningkatkan daya saing melalui pengembangan iklim investasi yang kondusif serta kegiatan perekonomian yang mampu mengedepankan peningkatan keunggulan kompetitif, peningkatan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), pengembangan berbagai sara prasarana infrastuktur pendukung investasi, optimalisasi sumber energi baru serta pengembangan potensi IKM dan UMKM, disamping tetap mempertahankan kondusivitas keamanan dan politik.

Mengacu pada kondisi tersebut serta stabilitas wilayah yang cenderung terjaga, prediksi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kotawaringin Barat hingga akhir tahun 2017 diperkirakan naik sebesar 6,00 % dengan mempertimbangkan bahwa konsumsi rumah tangga tidak meningkat secara signifikan.

Dengan terjaganya tingkat pertumbuhan ekonomi yang konstan serta stabilitas dan ketersediaan barang modal produksi, diharapkan akan membuka berbagai lapangan kerja, sehingga dapat menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka hingga akhir 2017 menjadi 3,10% dari total jumlah angkatan kerja dan jumlah penduduk miskin menjadi 4,72%.

Berdasarkan pada kondisi yang mempengaruhi kondusivitas perekonomian Kabupaten Kotawaringin Barat, maka inflasi Kabupaten Kotawaringin Barat hingga akhir 2017 diprediksikan pada kisaran 4,00% dengan isu tekanan inflasi adalah ketersediaan dan distribusi bahan pokok utama, dampak pengetatan kuota subsidi BBM, pelemahan rupiah, jumlah uang beredar; adanya fluktuasi harga pada jenis komoditas *volatile foods* dan kemungkinan meningkatnya harga bahan baku produksi.

Pada harga kelompok barang *administered price* diprediksikan dapat terkendali bila tidak ada kebijakan untuk menaikkan harga yang dapat memicu terjadinya inflasi, khususnya pada komponen bahan bakar minyak.

Sehingga upaya untuk meningkatkan efisiensi penggunaan bahan bakar minyak dan substansinya semakin mendesak.

Berangkat dari perubahan asumsi dan tantangan dari perkembangan kondisi perekonomian makro Nasional dan Provinsi Kalimantan Tengah, dimana hal ini berimplikasi pada kondisi perekonomian di Kabupaten Kotawaringin Barat, maka perlu untuk melihat dan melakukan penyesuaian dalam target serta asumsi perekonomian.

Upaya tersebut dilakukan sebagai langkah untuk mengawal pencapaian target dan tujuan pembangunan yang dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahap ke III Periode 2017 - 2022 adalah : “Mengurangi disparitas antar wilayah melalui realokasi dan redistribusi sumber daya yang ada di Kotawaringin Barat” dengan tujuan pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) berbasis teknologi informasi,
2. Peningkatan kemandirian pembiayaan pembangunan,
3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia,
4. Pengembangan komoditi unggulan untuk pemenuhan kebutuhan pangan dan menopang perekonomian daerah,
5. Peningkatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi daerah,
6. Pengembangan industri, koperasi dan UMKM serta daya saing daerah,
7. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan penanggulangan bencana berdasarkan asas konservasi, efisien dan lestari,
8. Peningkatan dan pemerataan infrastruktur wilayah,
9. Peningkatan kesesuaian tata ruang wilayah yang berkualitas,
10. Peningkatan pemahaman, kesadaran dan pengamalan agama,
11. Peningkatan pemberdayaan masyarakat,
12. Peningkatan ketertiban dan ketentraman masyarakat,
13. Pengembangan dan pelestarian nilai-nilai budaya,
14. Peningkatan pariwisata daerah.

BAB II

EVALUASI HASIL RKPD TAHUN 2017 KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT SAMPAI DENGAN TRIWULAN KEDUA

2.1 Pengantar

Evaluasi hasil RKPD tahun 2017 Kabupaten Kotawaringin Barat sampai dengan triwulan kedua dilakukan melalui analisa capaian program. Evaluasi dilakukan dengan menghitung rerata indikator program.

Rerata indikator capaian dihitung dengan membandingkan capaian pada triwulan kedua program kegiatan tahun 2017 pada tiap SKPD dengan capaian yang harus dicapai pada triwulan kedua tahun 2017 dalam satuan persentase, atau dengan notasi sebagai berikut :

Rerata indikator capaian = (Nilai yang dicapai triwulan kedua tahun 2017 / target triwulan kedua tahun 2017) x 100%.

Dengan menggunakan kurva normal, maka penentuan kategori indeks rerata capaian juga terbagi menjadi 5 kategori yaitu sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah dan sangat rendah. Kelima kategori di atas dilakukan untuk menentukan kriteria dari pencapaian masing-masing misi. Adapun kriteria kategori skala penilaian sebagai berikut :

- (1) sangat tinggi $\geq 47,00\%$
- (2) tinggi $\geq 39,00\%$ - 46,99%
- (3) sedang $\geq 34,00\%$ - 38,99%
- (4) rendah $\geq 26,00\%$ - 33,99%
- (5) sangat rendah $\leq 25,99\%$

Nilai dari hasil perhitungan di setiap indikator program menjadi nilai dari program (rerata indikator kinerja maupun rerata indikator capaian). Selanjutnya nilai dari setiap program, pada akhirnya juga menjadi nilai dari setiap SKPD (rerata indikator kinerja maupun rerata indikator capaian).

2.2 Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan Berdasarkan SKPD

Evaluasi kinerja program dan kegiatan pada tahun 2017 berdasarkan SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat selengkapnya tersaji pada uraian berikut :

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Tabel 2.1
Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	APBD MURNI 2017 (Rp.)	REALISASI APBD MURNI 2017		KATEGORI
		SPJ (Rp.)	%	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB (Pelayanan Dasar)				
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	46,025,428,000	3,122,712,936	6.78	Sangat Rendah
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2,555,968,650	356,015,520	13.93	Sangat Rendah
Penyediaan jasa surat menyurat	4,200,000	24,500		
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	293,400,000	70,978,721		
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	10,925,000	2,154,900		
Penyediaan jasa administrasi keuangan	577,103,900	72,142,100		
Penyediaan jasa kebersihan kantor	132,785,400	34,696,400		
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	45,180,000	3,875,000		
Penyediaan alat tulis kantor	149,374,000	12,061,000		
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	121,950,000	9,712,500		
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	26,175,000	2,187,500		
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	546,000,000	0		
Penyediaan peralatan rumah tangga	10,300,000	0		
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	5,000,000	0		
Penyediaan makanan dan minuman	316,755,000	22,522,500		
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	316,820,350	125,660,399		
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	3,746,199,250	83,486,500	2.23	Sangat Rendah
Pembangunan gedung kantor	2,521,914,250	58,213,500		
Pengadaan kendaraan dinas/operasional	500,000,000	0		
Pengadaan perlengkapan gedung kantor	115,000,000	0		
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	159,520,000	0		

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	314,000,000	23,173,000		
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	37,650,000	2,100,000		
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	98,115,000	0		
Program peningkatan disiplin aparatur	191,000,000	0	0.00	Sangat Rendah
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	191,000,000	0		
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	234,450,000	130,779,649	55.78	Sangat Tinggi
Sosialisasi peraturan perundang-undangan	109,950,000	55,215,000		
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	124,500,000	75,564,649		
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	32,450,000	0	0.00	Sangat Rendah
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	3,300,000	0		
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	29,150,000	0		
Program Pendidikan Anak Usia Dini	3,456,653,500	117,366,825	3.40	Sangat Rendah
Pembangunan gedung sekolah	1,189,807,500	0		
Penambahan ruang kelas sekolah	592,346,000	0		
Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir	248,980,000	0		
Pembangunan sarana air bersih dan sanitary	143,325,000	0		
Pengadaaan alat praktik dan peraga siswa	320,000,000	0		
Pengadaan mebeluer sekolah	172,800,000	0		
Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah	358,700,000	0		
Pelatihan kompetensi tenaga pendidik	140,135,000	111,266,825		
Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini	250,560,000	6,100,000		
Monitoring, evaluasi dan pelaporan	40,000,000	0		
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	29,503,897,300	2,322,914,750	7.87	Sangat Rendah
Pembangunan gedung sekolah	180,932,000	0		

Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah	2,446,045,000	0		
Penambahan ruang kelas sekolah	2,578,292,000	0		
Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir	3,666,598,000	0		
Pembangunan perpustakaan sekolah	797,580,000	0		
Pembangunan jaringan instalasi listrik sekolah dan perlengkapannya	90,000,000	0		
Pembangunan sarana air bersih dan sanitary	109,720,000	0		
Pengadan buku-buku dan alat tulis siwa	950,000,000	0		
Pengadaaan alat praktik dan peraga siswa	375,000,000	0		
Pengadaan mebeluer sekolah	796,500,000	0		
Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah	184,900,000	0		
Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah	1,563,026,300	0		
Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	7,635,091,000	919,800,000		
Pelatihan kompetensi tenaga pendidik	42,300,000	0		
Penambahan ruang kelas baru SMP/MTS/SMPLB	797,580,000	0		
Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	6,127,010,000	1,166,831,750		
Penyelenggaraan Paket B Setara SMP	20,000,000	0		
Pembinaan minat, bakat, dan kreativitas siswa	606,633,000	222,358,000		
Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar	37,500,000	0		
Penyelenggaraan akreditas sekolah dasar	23,150,000	9,925,000		
Monitoring, evaluasi dan pelaporan	98,700,000	4,000,000		
Penyediaan beasiswa berprestasi	275,000,000	0		
Pembangunan Laboratorium dan Ruang Pratikum Sekolah	102,340,000	0		

Program Pendidikan Non Formal	759,290,000	0	0.00	Sangat Rendah
Pengembangan pendidikan kecakapan hidup	759,290,000	0		
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1,879,555,500	94,179,700	5.01	Sangat Rendah
Pembinaan kelompok kerja guru (KKG)	177,200,000	0		
Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik	1,702,355,500	94,179,700		
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	414,690,000	17,969,992	4.33	Sangat Rendah
Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan	195,200,000	10,469,992		
Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan	43,440,000	0		
Pembinaan dewan pendidikan	48,500,000	0		
Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan	127,550,000	7,500,000		
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	1,233,768,800	0	0.00	Sangat Rendah
Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air	645,000,000	0		
Pengembangan kebudayaan dan pariwisata	538,768,800	0		
Pengelolaan karya cetak dan karya rekam	50,000,000	0		
Program Pengelolaan Keragaman Budaya	2,017,505,000	0	0.00	Sangat Rendah
Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	1,026,000,000	0		
Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah	49,000,000	0		
Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	942,505,000	0		

Hasil Evaluasi pelaksanaan program pada SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Wajib (Pelayanan Dasar) sebanyak 12 program. Hasil evaluasi terlihat 11 program masuk dalam kategori sangat rendah dan 1 program sangat tinggi. Secara keseluruhan, evaluasi pelaksanaan program pada SKPD ini dikategorikan sangat rendah dengan nilai 6,78.

2. Dinas Kesehatan

Tabel 2.2
Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas Kesehatan

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	APBD MURNI 2017 (Rp.)	REALISASI APBD MURNI 2017		KATEGORI
		SPJ (Rp.)	%	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB (Pelayanan Dasar)				
DINAS KESEHATAN	62,538,259,000	6,915,361,673	11.06	Sangat Rendah
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2,077,364,140	602,866,110	29.02	Rendah
Penyediaan jasa surat menyurat	600,000	0		
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	389,335,000	114,339,521		
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	11,650,000	1,116,500		
Penyediaan jasa administrasi keuangan	743,379,000	146,991,000		
Penyediaan jasa kebersihan kantor	119,325,000	36,717,000		
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	22,880,000	997,500		
Penyediaan alat tulis kantor	138,480,140	133,590,200		
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	113,905,000	55,681,250		
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12,420,000	0		
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	71,200,000	0		
Penyediaan makanan dan minuman	236,340,000	44,870,000		
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	217,850,000	68,563,139		
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1,903,043,000	15,937,585	0.84	Sangat Rendah
Pembangunan gedung kantor	1,020,650,000	0		
Pengadaan kendaraan dinas/operasional	441,483,000	0		
Pengadaan perlengkapan gedung kantor	259,400,000	0		
Pengadaan mebeleur	13,000,000	0		
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	50,320,000	0		
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	96,700,000	14,767,585		
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	21,490,000	1,170,000		

Program peningkatan disiplin aparatur	65,000,000	0	0.00	Sangat Rendah
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	65,000,000	0		
Program fasilitas pindah/purna tugas PNS	15,000,000	0		
Pemulangan pegawai yang pensiun	15,000,000	0		
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	264,366,000	121,235,531	45.86	Tinggi
Pendidikan dan pelatihan formal	172,366,000	64,799,002		
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	92,000,000	56,436,529		
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	8,500,000	0	0.00	Sangat Rendah
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	500,000	0		
Penyusunan laporan keuangan semesteran	3,000,000	0		
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	5,000,000	0		
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	5,739,702,000	1,005,698,300	17.52	Sangat Rendah
Pengadaaan obat dan perbekalan kesehatan	5,304,662,000	907,413,800		
Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan	393,440,000	82,934,500		
Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan	41,600,000	15,350,000		
Program Upaya Kesehatan Masyarakat	19,737,017,760	3,014,931,278	15.28	Sangat Rendah
Pelayanan kesehatan penduduk miskin dipuskesmas dan jaringannya	159,218,000	53,667,600		
Pelayanan kefarmasian dan perbekalan kesehatan	90,180,000	0		
Peningkatan kesehatan masyarakat	5,808,860,900	1,670,134,950		
Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan	31,900,000	0		
penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan	13,646,858,860	1,291,128,728		
Program Pengawasan Obat dan Makanan	783,485,000	13,235,000	1.69	Sangat Rendah
Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya	103,485,000	13,235,000		

Peningkatan kapasitas laboratorium pengawasan obat dan makanan	680,000,000	0		
Program Pengembangan Obat Asli Indonesia	39,215,000	0	0.00	Sangat Rendah
Pengembanganstandarisasi tanaman obat bahan alam indonesia	39,215,000	0		
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	667,029,500	80,854,500	12.12	Sangat Rendah
Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat	531,047,000	76,191,700		
Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat	95,240,000	0		
Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan	40,742,500	4,662,800		
Program Perbaikan Gizi Masyarakat	255,200,000	0	0.00	Sangat Rendah
Pemberian tambahan makanan dan vitamin	255,200,000	0		
Program Pengembangan Lingkungan Sehat	732,366,800	57,250,000	7.82	Sangat Rendah
Pengkajian pengembangan lingkungan sehat	558,541,800	13,280,000		
Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat	140,965,000	36,370,000		
Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat	32,860,000	7,600,000		
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	1,175,039,750	68,409,664	5.82	Sangat Rendah
Penyemprotan/fogging sarang nyamuk	240,000,000	11,760,000		
Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	614,189,750	25,967,164		
Peningkatan Imunisasi	144,580,000	12,500,000		
Peningkatan surveillanc epideminologi dan penaggulangan wabah	176,270,000	18,182,500		
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	1,275,328,250	197,931,705	15.52	Sangat Rendah
Penyusunan standar kesehatan	628,140,000	64,540,000		
Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesahatan	316,565,000	98,387,005		
Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan	74,975,000	0		
Monitoring, evaluasi dan pelaporan	255,648,250	35,004,700		

Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya	6,197,500,000	0	0.00	Sangat Rendah
Pembangunan puskesmas	2,233,500,000	0		
Pembangunan puskesmas pembantu	1,285,900,000	0		
Pengadaaan puskesmas keliling	452,300,000	0		
Pengadaaan sarana dan prasarana puskesmas	927,900,000	0		
Pengadaaan sarana dan prasarana puskesmas pembantu	155,000,000	0		
Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas	95,000,000	0		
Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas pembantu	50,000,000	0		
Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas keliling	60,000,000	0		
Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu	937,900,000	0		
Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	18,793,998,000	1,732,912,000	9.22	Sangat Rendah
kemitraan asuransi kesehatan masyarakat	18,793,998,000	1,732,912,000		
Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	84,254,800	0	0.00	Sangat Rendah
Penyuluhan kesehatan anak balita	84,254,800	0		
Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	76,460,000	4,100,000	5.36	Sangat Rendah
Pelayanan pemeliharaan kesehatan	76,460,000	4,100,000		
Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	2,648,389,000	0	0.00	Sangat Rendah
Pertolongan persalinan bagi ibu hamil	2,648,389,000	0		

Hasil evaluasi pelaksanaan program pada SKPD Dinas Kesehatan yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Wajib (Pelayanan Dasar), terdiri dari 19 program, dengan 1 program dikategorikan rendah, 1 program tinggi sedangkan 17 program lainnya dikategorikan sangat rendah. Secara keseluruhan, evaluasi pelaksanaan program pada SKPD ini dikategorikan sangat rendah dengan nilai 11,06.

3. RSUD Sultan Imanuddin

Tabel 2.3
Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program RSUD Sultan Imanuddin

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	APBD MURNI 2017 (Rp.)	REALISASI APBD MURNI 2017		KATEGORI
		SPJ (Rp.)	%	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB (Pelayanan Dasar)				
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	131,570,444,000	27,642,672,781	21.01	Sangat Rendah
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2,398,961,250	592,864,943	24.71	Sangat Rendah
Penyediaan jasa administrasi keuangan	244,191,250	0		
Penyediaan alat tulis kantor	201,200,000	0		
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	353,700,000	69,300,000		
Penyediaan makanan dan minuman	1,479,870,000	491,475,000		
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	120,000,000	32,089,943		
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1,370,986,500	40,000,000	2.92	Sangat Rendah
Pembangunan rumah dinas	492,536,500	0		
Pengadaan kendaraan dinas/operasional	355,000,000	0		
Pengadaan perlengkapan gedung kantor	191,200,000	0		
Pengadaan mebeleur	110,000,000	0		
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	123,200,000	40,000,000		
Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas	99,050,000	0		
Program peningkatan disiplin aparatur	294,050,000	0	0.00	Sangat Rendah
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	294,050,000	0		
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	145,500,000	109,085,108	74.97	Sangat Tinggi
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	145,500,000	109,085,108		
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	11,000,000	0	0.00	Sangat Rendah
Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD	3,000,000	0		
Penyusunan laporan keuangan semesteran	3,000,000	0		

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	5,000,000	0		
Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	51,013,946,250	9,147,108,000	17.93	Sangat Rendah
Pembangunan rumah sakit	43,443,296,250	8,797,408,000		
Pengadaan alat-alat rumah sakit	7,384,450,000	349,700,000		
Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lain-lain)	186,200,000	0		
Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	436,000,000	67,652,071	15.52	Sangat Rendah
kemitraan alih teknologi kedokteran dan kesehatan	131,200,000	57,520,881		
kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis	101,200,000	10,131,190		
kemitraan pengobatan bagi pasien kurang mampu	203,600,000	0		
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	75,900,000,000	17,685,962,659	23.30	Sangat Rendah
Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan di RSUD	75,900,000,000	17,685,962,659		

Hasil evaluasi pelaksanaan program pada RSUD Sultan Imanuddin yang mengampu Urusan Pemerintahan Wajib (Pelayanan Dasar) yang terdiri dari 8 program dapat dikategorikan Sangat Rendah dengan nilai 21,01. Hal ini dapat terlihat dari 1 program dikategorikan sangat tinggi dan 7 program lainnya dikategorikan sangat rendah.

4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Tabel 2.4
Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	APBD MURNI 2017 (Rp.)	REALISASI APBD MURNI 2017		KATEGORI
		SPJ (Rp.)	%	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB (Pelayanan Dasar)				
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	232,858,913,000	30,308,205,750	13.02	Sangat Rendah
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3,507,886,600	573,171,743	16.34	Sangat Rendah



Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	303,000,000	80,250,235		
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	77,598,250	0		
Penyediaan jasa administrasi keuangan	1,430,805,100	231,869,100		
Penyediaan jasa kebersihan kantor	5,535,000	0		
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	28,250,000	4,015,000		
Penyediaan alat tulis kantor	168,864,250	0		
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	56,250,000	0		
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	3,870,000	930,000		
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	439,869,000	0		
Penyediaan makanan dan minuman	438,845,000	120,855,000		
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	555,000,000	135,252,408		
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	2,979,221,400	8,836,453	0.30	Sangat Rendah
Pengadaan perlengkapan gedung kantor	112,400,000	0		
Pengadaan mebeleur	45,000,000	0		
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	2,722,821,400	0		
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	93,000,000	7,486,453		
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	6,000,000	1,350,000		
Program peningkatan disiplin aparatur	107,250,000	0	0.00	Sangat Rendah
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	107,250,000	0		
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	165,000,000	89,379,515	54.17	Sangat Tinggi
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	165,000,000	89,379,515		
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	3,037,500	0	0.00	Sangat Rendah
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	637,500	0		
Penyusunan laporan keuangan semesteran	1,200,000	0		

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	1,200,000	0		
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	145,848,309,600	29,126,897,339	19.97	Sangat Rendah
Pembangunan jalan	8,924,558,000	1,336,330,500		
Pembangunan jembatan	12,163,551,200	3,024,281,340		
Peningkatan Jalan	93,544,248,000	24,724,409,499		
Peningkatan jalan lingkungan pemukiman	31,215,952,400	41,876,000		
Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	11,344,000,000	41,123,600	0.36	Sangat Rendah
Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	11,344,000,000	41,123,600		
Program Pembangunan turap/talud/brojong	1,636,303,400	25,125,600		
Pembangunan turap/talud/bronjong	1,636,303,400	25,125,600		
Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan	3,722,642,800	18,172,600	0.49	Sangat Rendah
Rehabilitasi/pemeliharaan jalan	3,092,642,800	6,391,600		
Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan	630,000,000	11,781,000		
Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan	200,000,000	19,112,500	9.56	Sangat Rendah
Penyusunan sistem informasi/data base jalan	100,000,000	0		
Penyusunan sistem informasi/data base jembatan	100,000,000	19,112,500		
Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	1,158,102,800	179,392,000	15.49	Sangat Rendah
Pengadaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan	362,010,400	47,241,600		
Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat	770,142,400	132,150,400		
Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan	25,950,000	0		
Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	26,411,485,200	25,125,600	0.10	Sangat Rendah
Perencanaan pembangunan jaringan irigasi	502,500,000	0		
Pembangunan pintu air	3,088,350,000	0		
Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi	6,120,945,000	0		

Rehabilitasi/pemeliharaan normalisasi saluran sungai	4,295,786,800	0		
Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi yang telah dibangun	234,750,000	0		
Pembangunan jaringan irigasi	5,725,110,000	0		
Peningkatan jaringan irigasi	6,444,043,400	25,125,600		
Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya	1,865,475,000	0	0.00	Sangat Rendah
Pembangunan embung dan bangunan penampung air lainnya	1,865,475,000	0		
Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	10,366,688,800	0	0.00	Sangat Rendah
Penyediaan prasarana dan sarana air limbah	4,307,530,000	0		
Pengembangan distribusi air minum	6,059,158,800	0		
Program pengendalian banjir	5,629,048,400	25,125,600	0.45	Sangat Rendah
Mengendalikan banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai	3,257,423,400	25,125,600		
Pembangunan prasarana pengaman pantai	2,371,625,000	0		
Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	7,615,560,000	0	0.00	Sangat Rendah
Perencanaan pengembangan infrastruktur	1,503,000,000	0		
Pembangunan/peningkatan infrastruktur	6,112,560,000	0		
Program pembangunan infrastruktur perdesaaan	10,298,901,500	176,743,200	1.72	Sangat Rendah
Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaaan	403,901,500	0		
Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan perdesaaan	2,200,000,000	1,000,000		
Peningkatan jalan perdesaan	7,695,000,000	175,743,200		

Hasil evaluasi pelaksanaan program pada SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melaksanakan Urusan Pemerintahan Wajib (Pelayanan Dasar) yang terdiri dari 16 program. Berdasarkan evaluasi 15 program dikategorikan sangat rendah dan 1 program dikategorikan sangat tinggi. Dengan nilai total 13,02 yang berarti masuk dalam kategori sangat rendah.

5. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Tabel 2.5
Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	APBD MURNI 2017 (Rp.)	REALISASI APBD MURNI 2017		KATEGORI
		SPJ (Rp.)	%	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB (Pelayanan Dasar)				
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	3,712,520,000	305,184,836	8.22	Sangat Rendah
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	718,470,000	133,533,647	18.59	Sangat Rendah
Penyediaan jasa surat menyurat	1,000,000	0		
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	98,100,000	14,123,547		
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	6,210,000	0		
Penyediaan jasa administrasi keuangan	146,201,800	33,349,200		
Penyediaan jasa kebersihan kantor	45,690,800	11,413,700		
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	7,000,000	0		
Penyediaan alat tulis kantor	40,982,900	15,285,000		
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	25,325,000	6,285,000		
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	25,025,000	5,265,000		
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	151,700,000	0		
Penyediaan peralatan rumah tangga	6,320,000	1,700,000		
Penyediaan makanan dan minuman	43,320,000	2,453,400		
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	121,594,500	43,658,800		
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	350,375,000	0	0.00	Sangat Rendah
Pengadaan perlengkapan gedung kantor	232,375,000	0		
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	40,200,000	0		
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	73,500,000	0		
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	4,300,000	0		
Program peningkatan disiplin aparatur	55,000,000	0	0.00	Sangat Rendah

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	27,500,000	0		
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	27,500,000	0		
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	99,000,000	57,983,689	58.57	Sangat Tinggi
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	99,000,000	57,983,689		
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	7,155,000	0	0.00	Sangat Rendah
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	2,025,000	0		
Penyusunan laporan keuangan semesteran	2,025,000	0		
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	3,105,000	0		
Program Pengembangan Perumahan	320,000,000	1,050,000	0.33	Sangat Rendah
Perencanaan Perumahan dan Permukiman	320,000,000	1,050,000		
Program pengelolaan areal pemakaman	2,012,520,000	86,910,000	4.32	Sangat Rendah
Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman	1,641,650,000	3,400,000		
Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman	370,870,000	83,510,000		
Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	150,000,000	25,707,500	17.14	Sangat Rendah
Penataan penguasaan, pemilikan , penggunaan dan pemanfaatan tanah	150,000,000	25,707,500		

Hasil evaluasi pelaksanaan program pada SKPD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan pemukiman melaksanakan Urusan Pemerintahan Wajib (Pelayanan Dasar) yang terdiri dari 8 program. Berdasarkan evaluasi terhadap 8 program yang dilaksanakan tersebut, 1 program dikategorikan Sangat tinggi dan 7 program dikategorikan sangat rendah dengan nilai total 8,22 yang berarti masuk dalam kategori sangat rendah.

6. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Tabel 2.6
Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Satpol PP dan Damkar

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	APBD MURNI 2017 (Rp.)	REALISASI APBD MURNI 2017		KATEGORI
		SPJ (Rp.)	%	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB (Pelayanan Dasar)				
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	5,232,762,000	1,308,393,989	25.00	Sangat Rendah
Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	1,386,925,500	217,473,400	15.68	Sangat Rendah
Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran	593,000,000	0		
Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran	151,200,000	52,006,500		
Kegiatan pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran	642,725,500	165,466,900		
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	693,108,103	187,840,835	27.10	Rendah
Penyediaan jasa surat menyurat	500,000	0		
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	45,360,000	8,250,102		
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	2,100,000	1,000,000		
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	7,423,500	551,800		
Penyediaan jasa administrasi keuangan	122,334,000	22,000,000		
Penyediaan jasa kebersihan kantor	33,616,700	11,030,400		
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	7,100,000	0		
Penyediaan alat tulis kantor	36,512,000	10,221,000		
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	17,040,000	3,500,000		
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	3,000,000	0		
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	17,474,800	0		
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1,600,000	0		
Penyediaan makanan dan minuman	255,112,500	57,570,000		

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	143,934,603	73,717,533		
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	300,220,000	65,030,000	21.66	Sangat Rendah
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	300,220,000	65,030,000		
Program peningkatan disiplin aparatur	54,000,000	0	0.00	Sangat Rendah
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	54,000,000	0		
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	81,000,000	49,498,154	61.11	Sangat Tinggi
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	81,000,000	49,498,154		
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	8,847,500	0	0.00	Sangat Rendah
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	522,500	0		
Penyusunan laporan keuangan semesteran	3,162,500	0		
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	5,162,500	0		
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	2,484,277,500	778,651,600	31.34	Rendah
Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	1,765,927,500	753,051,600		
Pembangunan pos jaga/ ronda	486,740,000	0		
Pengendalian kebisingan dan gangguan dari kegiatan masyarakat	181,260,000	0		
Monitoring, evaluasi dan pelaporan	50,350,000	25,600,000		
Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	13,625,000	4,500,000	33.03	Rendah
Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja	5,225,000	0		
Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan	4,500,000	4,500,000		
Kerjasama pengembangan kemampuan aparat polisi pamong praja dengan TNI/ POLRI dan Kejaksaan	3,900,000	0		

Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	210,758,397	5,400,000	2.56	Sangat Rendah
Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba	56,658,397	0		
Penyuluhan pencegahan berkembangnya praktek prostitusi	128,625,000	0		
Penyuluhan pencegahan dan penertiban aksi premanisme	1,575,000	0		
Monitoring, evaluasi dan pelaporan	23,900,000	5,400,000		

Hasil evaluasi pelaksanaan program pada SKPD Satuan Polisi Pamong Praja, yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Wajib (Pelayanan Dasar) dengan total 9 program yang dilaksanakan secara keseluruhan masuk dalam kategori sangat rendah dengan nilai 25,00. Hal ini dapat terlihat dari program yang dilaksanakan, 1 program yang dikategorikan sangat tinggi, 3 program yang dikategorikan rendah, serta 5 program dengan kategori sangat rendah.

7. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Tabel 2.7
Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Badankesbangpol

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	APBD MURNI 2017 (Rp.)	REALISASI APBD MURNI 2017		KATEGORI
		SPJ (Rp.)	%	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB (Pelayanan Dasar)				
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	2,573,549,000	513,811,925	19.97	Sangat Rendah
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	727,650,500	203,699,978	27.99	Sangat Rendah
Penyediaan jasa surat menyurat	600,000	0		
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	117,000,000	33,656,776		
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	3,650,000	0		
Penyediaan jasa administrasi keuangan	164,056,800	37,733,200		
Penyediaan jasa kebersihan kantor	39,379,200	7,622,800		
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	27,770,000	3,000,000		
Penyediaan alat tulis kantor	64,068,200	29,634,100		
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	31,180,500	19,680,000		

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5,935,000	5,935,000		
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	39,000,000	0		
Penyediaan makanan dan minuman	15,540,000	4,760,000		
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	219,470,800	61,678,102		
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	357,245,000	166,643,340	46.65	Tinggi
Pengadaan mebeleur	35,850,000	0		
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	35,000,000	0		
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	119,000,000	20,882,840		
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	8,070,000	4,383,000		
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	159,325,000	141,377,500		
Program peningkatan disiplin aparatur	44,000,000	18,700,000	42.50	Tinggi
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	22,000,000	18,700,000		
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	22,000,000	0		
Program fasilitas pindah/purna tugas PNS	15,000,000	0	0.00	Sangat Rendah
Pemulangan pegawai yang pensiun	15,000,000	0		
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	106,600,000	46,084,705	43.23	Tinggi
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	106,600,000	46,084,705		
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	9,000,000	0	0.00	Sangat Rendah
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1,000,000	0		
Penyusunan laporan keuangan semesteran	3,000,000	0		
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	5,000,000	0		
Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	556,060,000	23,072,902	4.15	Sangat Rendah
Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan	556,060,000	23,072,902		

Program pengembangan wawasan kebangsaan	286,705,000	3,600,000	1.26	Sangat Rendah
Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat	159,760,000	0		
Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	126,945,000	3,600,000		
Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	232,990,000	1,050,000	0.45	Sangat Rendah
Fasilitasi pencapaian halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan	173,700,000	1,050,000		
Seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan	59,290,000	0		
Program pendidikan politik masyarakat	238,298,500	50,961,000	21.39	Sangat Rendah
Penyuluhan kepada masyarakat	139,233,500	50,961,000		
koordinasi forum-forum diskusi politik	99,065,000	0		

Hasil evaluasi pelaksanaan program pada SKPD Badan Kesbangpol, yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Wajib (Pelayanan Dasar) dengan total 10 program yang dilaksanakan, secara keseluruhan masuk dalam kategori Sangat Rendah dengan nilai 19,97. Hal ini dapat terlihat dari program yang dilaksanakan, 3 program kategori tinggi, sedangkan 7 program lainnya masuk dalam kategori sangat rendah.

8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Tabel 2.8
Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	APBD MURNI 2017 (Rp.)	REALISASI APBD MURNI 2017		KATEGORI
		SPJ (Rp.)	%	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB (Pelayanan Dasar)				
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	3,831,121,000	333,953,637	8.72	Sangat Rendah
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	938,260,000	168,044,529	17.91	Sangat Rendah
Penyediaan jasa surat menyurat	2,400,000	0		
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	102,000,000	28,050,217		

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	18,950,000	0		
Penyediaan jasa administrasi keuangan	168,256,700	18,070,000		
Penyediaan jasa kebersihan kantor	58,667,600	17,542,100		
Penyediaan alat tulis kantor	49,442,500	15,000,000		
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	28,500,000	8,900,000		
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	6,490,000	2,997,250		
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	43,000,000	0		
Penyediaan peralatan rumah tangga	32,018,750	0		
Penyediaan makanan dan minuman	188,835,000	28,545,000		
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	239,699,450	48,939,962		
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1,809,087,500	22,170,000	1.23	Sangat Rendah
Pembangunan gedung kantor	1,577,900,000	0		
Pengadaan kendaraan dinas/operasional	0			
Pengadaan peralatan gedung kantor	15,750,000	0		
Pengadaan mebeleur	32,937,500	0		
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	20,000,000	0		
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	150,400,000	22,170,000		
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	3,700,000	0		
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	8,400,000	0		
Program peningkatan disiplin aparatur	84,000,000	0	0.00	Sangat Rendah
Pengadaan pakaian kerja lapangan	54,000,000	0		
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	30,000,000	0		
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	72,000,000	42,547,604	59.09	Sangat Tinggi
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	72,000,000	42,547,604		
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	5,486,000	0	0.00	Sangat Rendah

Penyusunan laporan keuangan semesteran	2,557,000	0		
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	2,929,000	0		
Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	616,627,500	64,428,502	10.45	Sangat Rendah
Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam	147,642,500	0		
Patroli Satgas dan Posko Penanggulangan Kebakaran Hutan, Lahan dan Pekarangan	308,350,000	20,141,502		
Patroli Pencegahan dan Siap Siaga Terhadap Banjir dan Tanah Longsor	160,635,000	44,287,000		
Program Tanggap Darurat Pasca Bencana	237,410,000	15,703,002	6.61	Sangat Rendah
Penyusunan Program dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi	59,075,000	9,428,002		
Penyusunan Laporan dan Evaluasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	29,750,000	3,525,000		
Pengendalian Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi	53,585,000	2,750,000		
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	95,000,000	0		
Program Tanggap Darurat	68,250,000	21,060,000	30.86	Rendah
Penyediaan Jasa Keuangan dan Pembentukan TRC/SRC	15,250,000	0		
Pengangkutan Logistik	37,750,000	16,360,000		
Monitoring dan Evaluasi Status Keadaan Darurat Bencana	15,250,000	4,700,000		

Hasil evaluasi pelaksanaan program pada SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Wajib (Pelayanan Dasar) dengan total 8 program yang dilaksanakan secara keseluruhan masuk dalam kategori sangat rendah dengan nilai 8,72. Hal ini dapat terlihat dari 6 program yang dilaksanakan dalam kategori sangat rendah, 1 program kategori sangat tinggi dan 1 program dalam kategori rendah.

9. Dinas Sosial

Tabel 2.9
Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas Sosial

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	APBD MURNI 2017 (Rp.)	REALISASI APBD MURNI 2017		KATEGORI
		SPJ (Rp.)	%	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB (Pelayanan Dasar)				
DINAS SOSIAL	2,277,329,000	406,471,461	17.85	Sangat Rendah
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	558,622,500	190,978,056	34.19	Sedang
Penyediaan jasa surat menyurat	995,000	246,000		
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	98,100,000	29,766,270		
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	6,210,000	1,169,300		
Penyediaan jasa administrasi keuangan	146,201,800	29,255,000		
Penyediaan jasa kebersihan kantor	35,832,800	15,775,800		
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	7,000,000	3,500,000		
Penyediaan alat tulis kantor	40,982,900	40,803,500		
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	25,325,000	10,325,000		
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5,155,000	5,155,000		
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	18,000,000	17,880,000		
Penyediaan makanan dan minuman	23,820,000	0		
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	151,000,000	37,102,186		
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	217,600,000	31,680,400	14.56	Sangat Rendah
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	106,200,000	29,180,400		
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	4,900,000	2,500,000		
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	106,500,000	0		
Program peningkatan disiplin aparatur	24,200,000	0	0.00	Sangat Rendah
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	24,200,000	0		
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	63,000,000	54,091,005	85.86	Sangat Tinggi

Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	63,000,000	54,091,005		
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	9,461,000	1,461,000	15.44	Sangat Rendah
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1,461,000	1,461,000		
Penyusunan laporan keuangan semesteran	3,000,000	0		
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	5,000,000	0		
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	474,175,000	0	0.00	Sangat Rendah
Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin	377,300,000	0		
Pelatihan keterampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial	96,875,000	0		
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	373,220,000	74,001,000	19.83	Sangat Rendah
Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	107,570,000	6,431,000		
penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	152,500,000	30,320,000		
Monitoring, evaluasi dan pelaporan	10,000,000	0		
Pengendalian Pelaksanaan Program Keluarga Harapan	103,150,000	37,250,000		
Program pembinaan anak terlantar	113,500,000	6,430,000	5.67	Sangat Rendah
Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar	113,500,000	6,430,000		
Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	53,555,000	0	0.00	Sangat Rendah
Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma	53,555,000	0		
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	389,995,500	47,830,000	12.26	Sangat Rendah

Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha	50,000,000	43,930,000		
Peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat	62,855,000	0		
Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat	30,000,000	0		
Pelestarian dan Pendayagunaan Nilai Kepahlawanan, Keberintisan, Kejuangan dan Kesetiakawanan Sosial	247,140,500	3,900,000		

Hasil evaluasi pelaksanaan program pada SKPD Dinas Sosial, yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Wajib (Pelayanan Dasar) dengan total 10 program yang dilaksanakan secara keseluruhan masuk dalam kategori sangat rendah dengan nilai 17,85. Hal ini dapat terlihat dari 1 program yang dikategorikan sangat tinggi, 1 program dikategorikan rendah, sedangkan 8 program lainnya masuk dalam kategori sangat rendah.

10. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Tabel 2.10
Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	APBD MURNI 2017 (Rp.)	REALISASI APBD MURNI 2017		KATEGORI
		SPJ (Rp.)	%	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB (Non Pelayanan Dasar)				
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	4,804,392,000	737,493,685	15.35	Sangat Rendah
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	951,637,408	255,571,262	26.86	Rendah
Penyediaan jasa surat menyurat	3,000,000	709,000		
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	99,300,000	32,527,153		
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	6,150,000	1,883,400		
Penyediaan jasa administrasi keuangan	247,246,000	70,272,000		
Penyediaan jasa kebersihan kantor	86,319,200	23,341,600		
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	10,790,000	2,125,000		
Penyediaan alat tulis kantor	55,125,000	0		
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	44,479,750	16,872,000		
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	9,940,000	6,190,000		

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	58,250,000	1,000,000		
Penyediaan peralatan rumah tangga	10,415,000	4,015,000		
Penyediaan makanan dan minuman	56,605,000	12,495,000		
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	264,017,458	84,141,109		
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	645,459,500	32,140,000	4.98	Sangat Rendah
Pembangunan gedung kantor	137,410,000	1,800,000		
Pengadaan kendaraan dinas/operasional	30,000,000	0		
Pengadaan mebeleur	39,300,000	0		
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	31,004,000	0		
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	126,300,000	24,860,000		
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	9,240,000	480,000		
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	272,205,500	5,000,000		
Program peningkatan disiplin aparatur	52,580,000	0	0.00	Sangat Rendah
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	52,580,000	0		
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	88,000,000	49,966,807	56.78	Sangat Tinggi
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	88,000,000	49,966,807		
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	3,684,000	1,632,000	44.30	Tinggi
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1,732,000	0		
Penyusunan laporan keuangan semesteran	130,000	0		
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	1,822,000	1,632,000		
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	1,912,284,300	307,356,096	16.07	Sangat Rendah
Pengadaan peralatan pendidikan dan keterampilan bagi pencari kerja	904,200,000	43,290,000		
Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja	879,073,000	238,886,700		
Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana BLK	108,411,300	25,179,396		
Rehabilitasi sedang/ berat sarana dan prasarana BLK	20,600,000	0		

Program Peningkatan Kesempatan Kerja	272,708,542	34,533,200	12.66	Sangat Rendah
Penyusunan informasi bursa tenaga kerja	121,548,542	27,573,200		
Penyiapan tenaga kerja siap pakai	151,160,000	6,960,000		
Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	267,078,250	43,910,000	16.44	Sangat Rendah
Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial	93,280,000	21,960,000		
Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan	81,825,000	8,250,000		
Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan	91,973,250	13,700,000		
Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	610,960,000	12,384,320	2.03	Sangat Rendah
Penyediaan dan pengelolaan prasarana dan sarana sosial dan ekonomi di kawasan transmigrasi	610,960,000	12,384,320		

Hasil evaluasi pelaksanaan program pada SKPD Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Wajib (Non Pelayanan Dasar) dengan total 9 program yang dilaksanakan secara keseluruhan masuk dalam kategori rendah dengan nilai 15,35. Terdapat 1 program dengan kategori sangat tinggi, 1 program masuk dalam kategori tinggi, 1 program masuk dalam kategori rendah, sedangkan 6 program lainnya masuk dalam kategori sangat rendah .

11. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, DALDUK dan KB

Tabel 2.11
Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program DP3A, DALDUK KB

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	APBD MURNI 2017 (Rp.)	REALISASI APBD MURNI 2017		KATEGORI
		SPJ (Rp.)	%	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB (Non Pelayanan Dasar)				
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	4,062,260,000	429,891,414	10.58	Sangat Rendah



Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	753,486,700	178,248,520	23.66	Sangat Rendah
Penyediaan jasa surat menyurat	500,000	0		
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	45,000,000	13,544,245		
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	4,900,000	0		
Penyediaan jasa administrasi keuangan	229,387,100	39,524,600		
Penyediaan jasa kebersihan kantor	80,937,600	23,015,600		
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	8,040,000	2,300,000		
Penyediaan alat tulis kantor	32,732,000	8,247,300		
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	19,837,500	5,541,000		
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	3,325,000	0		
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	98,300,000	0		
Penyediaan makanan dan minuman	40,527,500	11,165,000		
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	190,000,000	74,910,775		
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1,731,897,500	118,965,000	6.87	Sangat Rendah
Pembangunan gedung kantor	1,062,257,500	115,515,000		
Pengadaan kendaraan dinas/operasional	375,000,000	0		
Pengadaan perlengkapan gedung kantor	225,640,000	0		
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	10,000,000	0		
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	55,500,000	3,450,000		
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	3,500,000	0		
Program peningkatan disiplin aparatur	36,960,000	34,760,000	94.05	Sangat Tinggi
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	36,960,000	34,760,000		
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	95,790,000	54,746,290	57.15	Sangat Tinggi
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	95,790,000	54,746,290		
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	8,000,000	0	0.00	Sangat Rendah

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	3,000,000	0		
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	5,000,000	0		
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	194,900,000	15,411,603	7.91	Sangat Rendah
Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2)	26,340,000	0		
Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	47,850,000	0		
Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	120,710,000	15,411,603		
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	125,251,500	0	0.00	Sangat Rendah
Sosialisasi sistem pencatatan dan pelaporan KDRT	58,302,500	0		
Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan	66,949,000	0		
Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	614,849,800	8,015,001	1.30	Sangat Rendah
Kegiatan pembinaan organisasi perempuan	568,047,800	8,015,001		
Kegiatan pameran hasil karya perempuan di bidang pembangunan	46,802,000	0		
Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	26,275,000	0	0.00	Sangat Rendah
Workshop peningkatan peran perempuan dalam pengambilan keputusan	26,275,000	0		
Program Keluarga Berencana	26,912,500	0	0.00	Sangat Rendah
Pembinaan Keluarga Berencana	26,912,500	0		
Program pelayanan kontrasepsi	105,605,000	16,485,000	15.61	Sangat Rendah
Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB	105,605,000	16,485,000		
Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	92,349,500	3,260,000	3.53	Sangat Rendah

Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB	92,349,500	3,260,000		
Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR	162,438,750	0	0.00	Sangat Rendah
Pendirian pusat pelayanan informasi dan konseling KKR	162,438,750	0		
Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	20,947,500	0	0.00	Sangat Rendah
Pengumpulan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	20,947,500	0		
Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga	31,796,250	0	0.00	Sangat Rendah
Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kecamatan	31,796,250	0		
Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU	34,800,000	0	0.00	Sangat Rendah
Pengkajian pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU	34,800,000	0		

Hasil evaluasi pelaksanaan program pada SKPD DP3,DALDUK KB, yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Wajib (Non Pelayanan Dasar) dengan total 16 program yang dilaksanakan secara keseluruhan masuk dalam kategori sangat rendah dengan nilai 10,58. Hal ini dapat terlihat dari 2 program yang masing-masing dikategorikan sangat tinggi, sedangkan 14 program lainnya masuk dalam kategori sangat rendah.

12. Dinas Ketahanan Pangan

Tabel 2.12
Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas Ketahanan Pangan

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	APBD MURNI 2017 (Rp.)	REALISASI APBD MURNI 2017		KATEGORI
		SPJ (Rp.)	%	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB (Non Pelayanan Dasar)				
DINAS KETAHANAN PANGAN	2,017,713,000	412,447,083	20.44	Sangat Rendah
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	648,809,800	180,405,970	27.81	Rendah

Penyediaan jasa surat menyurat	1,250,000	0		
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	53,400,000	15,755,768		
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	1,000,000	0		
Penyediaan jasa administrasi keuangan	173,577,400	44,576,400		
Penyediaan jasa kebersihan kantor	33,418,500	14,461,800		
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	51,680,000	0		
Penyediaan alat tulis kantor	90,313,400	29,556,900		
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	66,263,000	19,908,000		
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	2,750,000	2,750,000		
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	16,000,000	15,524,900		
Penyediaan peralatan rumah tangga	11,550,000	0		
Penyediaan makanan dan minuman	47,607,500	11,220,000		
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	100,000,000	26,652,202		
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	148,430,000	22,587,744	15.22	Sangat Rendah
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	146,600,000	22,587,744		
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	1,830,000	0		
Program peningkatan disiplin aparatur	146,300,000	70,850,000	48.43	Sangat Tinggi
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	73,150,000	70,850,000		
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	73,150,000	0		
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	113,000,000	54,882,984	48.57	Sangat Tinggi
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	113,000,000	54,882,984		
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	10,600,000	2,630,250	24.81	Sangat Rendah
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	2,300,000	1,830,250		
Penyusunan laporan keuangan semesteran	3,150,000	0		

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	5,150,000	800,000		
Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan	430,998,000	33,540,135	7.78	Sangat Rendah
Laporan berkala kondisi ketahanan pangan daerah	145,120,000	3,780,000		
Pengembangan cadangan pangan daerah	117,150,000	0		
Pengembangan desa mandiri pangan	80,403,000	19,100,200		
Peningkatan mutu dan keamanan pangan	72,100,000	6,000,000		
Monitoring, evaluasi dan pelaporan	16,225,000	4,659,935		
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	132,200,000	47,550,000	35.97	Sedang
Peningkatan kemampuan lembaga petani	132,200,000	47,550,000		
Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	387,375,200	0	0.00	Sangat Rendah
Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan	387,375,200	0		

Hasil evaluasi pelaksanaan program pada SKPD Dinas Ketahanan Pangan, yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Wajib (Non Pelayanan Dasar) dengan total 8 program yang dilaksanakan secara keseluruhan masuk dalam kategori sangat rendah dengan nilai 20,44. Hal ini dapat terlihat dari 2 program dikategorikan sangat tinggi, 1 program yang dilaksanakan dalam kategori sedang, 1 program dikategorikan rendah dan 4 program lainnya masuk dalam kategori sangat rendah.

13. Dinas Lingkungan Hidup

Tabel 2.13
Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program DLH

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	APBD MURNI 2017 (Rp.)	REALISASI APBD MURNI 2017		KATEGORI
		SPJ (Rp.)	%	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB (Non Pelayanan Dasar)				
DINAS LINGKUNGAN HIDUP	12,458,183,000	3,561,506,651	28.59	Rendah
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	686,678,200	145,334,975	21.16	Sangat Rendah
Penyediaan jasa surat menyurat	250,000	0		
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	84,750,000	14,558,740		

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	4,700,000	1,185,300		
Penyediaan jasa administrasi keuangan	183,479,600	29,842,400		
Penyediaan jasa kebersihan kantor	77,444,700	22,567,500		
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	21,300,000	5,200,000		
Penyediaan alat tulis kantor	35,376,900	8,974,900		
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	17,150,000	3,140,000		
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	3,122,000	1,561,000		
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	18,700,000	0		
Penyediaan peralatan rumah tangga	1,590,000	0		
Penyediaan makanan dan minuman	38,815,000	0		
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	200,000,000	58,305,135		
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	144,150,000	10,288,516	7.14	Sangat Rendah
Pembangunan gedung kantor	13,520,000	0		
Pengadaan perlengkapan gedung kantor	3,500,000	0		
Pengadaan mebeleur	12,000,000	0		
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	46,080,000	0		
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	64,500,000	9,588,516		
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	4,550,000	700,000		
Program peningkatan disiplin aparatur	47,300,000	0	0.00	Sangat Rendah
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	47,300,000	0		
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	172,000,000	61,576,309	35.80	Sadang
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	172,000,000	61,576,309		
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	2,600,000	0	0.00	Sangat Rendah
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1,000,000	0		
Penyusunan laporan keuangan semesteran	600,000	0		

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	1,000,000	0		
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	7,740,586,000	2,774,186,000	35.84	Sadang
Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	115,200,000	0		
Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	7,551,936,000	2,761,186,000		
Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan	73,450,000	13,000,000		
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	870,582,800	93,055,201	10.69	Sangat Rendah
Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura	142,630,000	6,280,000		
Pemantauan Kualitas Lingkungan	82,150,000	11,650,000		
Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup	51,400,000	25,600,000		
Pengelolaan B3 dan Limbah B3	27,000,000	9,300,000		
Pengkajian dampak lingkungan	242,129,100	14,943,500		
Peningkatan peringkat kinerja perusahaan (proper)	8,000,000	0		
Koordinasi penyusunan AMDAL	73,000,000	22,281,701		
Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup	244,273,700	3,000,000		
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	27,000,000	0	0.00	Sangat Rendah
Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air	15,000,000	0		
Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan	12,000,000	0		
Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber daya Alam	550,000,000	0	0.00	Sangat Rendah
Perencanaan dan penyusunan program pembangunan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup	550,000,000	0		
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	460,875,000	0	0.00	Sangat Rendah
Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan	108,375,000	0		

Pengembangan data dan informasi lingkungan	2,500,000	0		
Penyusunan data sumberdaya alam dan neraca sumber daya hutan (NSDH) nasional dan daerah	350,000,000	0		
Program Peningkatan Pengendalian Polusi	20,000,000	0	0.00	Sangat Rendah
Pengujian emisi udara akibat aktivitas industri	20,000,000	0		
Program Pengendalian kebakaran hutan	73,547,000	0	0.00	Sangat Rendah
Sosialisasi kebijakan pencegahan kebakaran hutan	73,547,000	0		
Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	1,662,864,000	477,065,650	28.69	Rendah
Pemeliharaan RTH	1,662,864,000	477,065,650		

Hasil evaluasi pelaksanaan program pada SKPD Dinas Lingkungan Hidup, yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Wajib (Non Pelayanan Dasar) dengan total 13 program yang dilaksanakan secara keseluruhan masuk dalam kategori Rendah dengan nilai 28,59. Hal ini dapat terlihat dari 2 program yang masing-masing dikategorikan sedang, 1 program dengan kategori rendah, sedangkan 10 program lainnya masuk dalam kategori sangat rendah.

14. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tabel 2.14
Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Disdukcapil

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	APBD MURNI 2017 (Rp.)	REALISASI APBD MURNI 2017		KATEGORI
		SPJ (Rp.)	%	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB (Non Pelayanan Dasar)				
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2,520,624,000	320,888,084	12.73	Sangat Rendah
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	894,518,100	178,051,379	19.90	Sangat Rendah
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	118,900,000	27,523,211		
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	3,018,000	0		
Penyediaan jasa administrasi keuangan	164,029,500	45,051,600		
Penyediaan jasa kebersihan kantor	66,691,900	19,739,100		
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	11,480,000	0		



Penyediaan alat tulis kantor	171,302,500	41,345,700		
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	11,500,000	0		
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	2,025,000	2,025,000		
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	136,050,000	0		
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	209,521,200	42,366,768		
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	486,420,000	24,321,625	5.00	Sangat Rendah
Pembangunan gedung kantor	152,650,000	0		
Pengadaan perlengkapan gedung kantor	58,300,000	10,500,000		
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	154,930,000	0		
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	109,500,000	13,821,625		
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	11,040,000	0		
Program peningkatan disiplin aparatur	79,930,000	24,546,500	30.71	Rendah
Pengadaan mesin/kartu absensi	30,000,000	0		
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	25,180,000	24,546,500		
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	24,750,000	0		
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	177,500,000	34,733,580	19.57	Sangat Rendah
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	177,500,000	34,733,580		
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	7,300,000	0	0.00	Sangat Rendah
Penyusunan laporan keuangan semesteran	2,737,500	0		
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	4,562,500	0		
Program Penataan Administrasi Kependudukan	874,955,900	59,235,000	6.77	Sangat Rendah
Pembangunan dan Pengoperasian SIAK secara terpadu	411,464,900	28,180,000		
Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating, dan pemeliharaan)	35,660,000	0		
Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan	76,250,000	0		

Penyediaan informasi yang dapat diakses masyarakat	32,000,000	0		
Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	121,636,000	9,360,000		
Sosialisasi kebijakan kependudukan	197,945,000	21,695,000		

Hasil evaluasi pelaksanaan program pada SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Wajib (Non Pelayanan Dasar) dengan total 6 program yang dilaksanakan secara keseluruhan masuk dalam kategori Sangat Rendah dengan nilai 12,73. Hal ini dapat terlihat dari 1 program yang dikategorikan rendah dan 5 program lainnya kategori sangat rendah.

15. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tabel 2.15
Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	APBD MURNI 2017 (Rp.)	REALISASI APBD MURNI 2017		KATEGORI
		SPJ (Rp.)	%	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB (Non Pelayanan Dasar)				
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	3,740,671,000	769,138,342	20.56	Sangat Rendah
Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	545,718,400	97,269,050	17.82	Sangat Rendah
Kegiatan pembinaan organisasi perempuan	545,718,400	97,269,050		
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	532,483,800	132,890,782	24.96	Sangat Rendah
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	80,400,000	24,591,098		
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	2,200,000	1,694,600		
Penyediaan jasa administrasi keuangan	118,444,000	42,134,700		
Penyediaan jasa kebersihan kantor	38,777,800	13,552,200		
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	26,310,000	6,175,000		
Penyediaan alat tulis kantor	70,502,000	12,942,500		
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	20,500,000	4,650,000		
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan	1,150,000	0		

kantor				
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	18,000,000	0		
Penyediaan makanan dan minuman	28,200,000	0		
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	128,000,000	27,150,684		
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	125,600,000	7,993,110	6.36	Sangat Rendah
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	31,550,000	0		
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	86,100,000	7,993,110		
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	7,950,000	0		
Program peningkatan disiplin aparatur	19,500,000	0	0.00	Sangat Rendah
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	19,500,000	0		
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	123,600,000	62,012,168	50.17	Sangat Tinggi
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	123,600,000	62,012,168		
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	8,400,000	0	0.00	Sangat Rendah
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1,350,000	0		
Penyusunan laporan keuangan semesteran	2,500,000	0		
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	4,550,000	0		
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	1,346,997,000	268,761,900	19.95	Sangat Rendah
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	204,275,000	38,000,000		
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat	32,722,000	0		
Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa	1,110,000,000	230,761,900		
Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	239,700,100	34,113,760	14.23	Sangat Rendah
Pelatihan ketrampilan manajemen badan usaha milik desa	99,000,100	20,343,760		

Fasilitasi permodalan bagi usaha mikro kecil dan menengah di perdesaan	140,700,000	13,770,000		
Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	484,607,300	107,564,713	22.20	Sangat Rendah
Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa	144,848,500	11,322,000		
Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa	41,700,000	41,495,000		
Pemberian stimulan pembangunan desa	198,558,800	18,454,600		
Monitoring, evaluasi dan pelaporan	99,500,000	36,293,113		
Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	188,984,500	49,742,759	26.32	Rendah
Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa	140,234,500	36,842,759		
Monitoring, evaluasi dan pelaporan	48,750,000	12,900,000		
Program peningkatan peran perempuan di perdesaan	80,442,400	8,790,100	10.93	Sangat Rendah
Pelatihan perempuan di perdesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif	80,442,400	8,790,100		
Penguatan penyusunan dan pendayagunaan profil Desa dan Kelurahan	44,637,500	0	0.00	Sangat Rendah
Penyusunan pendataan profil Desa dan Kelurahan	44,637,500	0		

Hasil evaluasi pelaksanaan program pada SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Wajib (*Non Pelayanan Dasar*), dengan total 12 program yang dilaksanakan secara keseluruhan masuk dalam kategori sangat rendah dengan nilai 20,56. Hal ini dapat terlihat dari 1 program kategori sangat tinggi, 1 program dengan kategori rendah, sedangkan 10 program lainnya masuk dalam kategori sangat rendah.

16. Dinas Perhubungan

Tabel 2.16
Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas Perhubungan

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	APBD MURNI 2017 (Rp.)	REALISASI APBD MURNI 2017		KATEGORI
		SPJ (Rp.)	%	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB (Non Pelayanan Dasar)				
DINAS PERHUBUNGAN	11,032,101,000	957,856,259	8.68	Sangat Rendah



Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2,238,753,000	695,390,705	31.06	Rendah
Penyediaan jasa surat menyurat	1,500,000	0		
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	104,400,000	24,026,483		
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	21,625,000	577,800		
Penyediaan jasa administrasi keuangan	913,177,800	248,793,000		
Penyediaan jasa kebersihan kantor	369,542,400	47,236,200		
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	52,200,000	3,810,000		
Penyediaan alat tulis kantor	67,532,800	22,348,000		
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	206,045,000	162,780,000		
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	10,380,000	4,000,000		
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	13,000,000	0		
Penyediaan makanan dan minuman	149,350,000	32,770,000		
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	330,000,000	149,049,222		
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1,132,941,000	82,436,704	7.28	Sangat Rendah
Pembangunan gedung kantor	587,475,000	17,821,000		
Pengadaan perlengkapan gedung kantor	111,000,000	0		
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	72,750,000	0		
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	286,166,000	56,828,204		
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	10,250,000	0		
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	65,300,000	7,787,500		
Program peningkatan disiplin aparatur	104,400,000	0	0.00	Sangat Rendah
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	67,500,000	0		
Pengadaan pakaian kerja lapangan	36,900,000	0		
Program fasilitas pindah/purna tugas PNS	30,000,000	0	0.00	Sangat Rendah
Pemulangan pegawai yang pensiun	30,000,000	0		
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	107,000,000	51,917,150	48.52	Sangat Tinggi

Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	107,000,000	51,917,150		
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	2,555,800,000	5,100,000	0.20	Sangat Rendah
Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	2,555,800,000	5,100,000		
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	480,425,000	79,108,700	16.47	Sangat Rendah
Kegiatan peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan	480,425,000	79,108,700		
Program Pembangunan dan Rehabilitasi / Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	929,982,000	26,026,000	2.80	Sangat Rendah
Pembangunan halte bus, taxi gedung terminal	929,982,000	26,026,000		
Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas	1,482,450,000	0	0.00	Sangat Rendah
Pengadaan rambu-rambu lalu lintas	443,700,000	0		
Pengadaan marka jalan	1,038,750,000	0		
Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	1,112,250,000	4,500,000	0.40	Sangat Rendah
Pembangunan balai pengujian kendaraan bermotor	1,112,250,000	4,500,000		
Program Pembangunan dan Rehabilitasi/Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLASDP	858,100,000	13,377,000	1.56	Sangat Rendah
Pembangunan Dermaga/Gedung LLASDP	858,100,000	13,377,000		

Hasil evaluasi pelaksanaan program pada SKPD Dinas Perhubungan, yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Wajib (Non Pelayanan Dasar) dengan total 11 program yang dilaksanakan, secara keseluruhan masuk dalam kategori sangat rendah dengan nilai 8,68. Hal ini dapat terlihat dari 1 program yang dikategorikan sangat tinggi, 1 program dikategorikan rendah dan 9 program lainnya masuk dalam kategori sangat rendah.

17. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

Tabel 2.17
Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas Komunikasi, Informatika,
Statistik dan Persandian

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	APBD MURNI 2017 (Rp.)	REALISASI APBD MURNI 2017		KATEGORI
		SPJ (Rp.)	%	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB (Non Pelayanan Dasar)				
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	2,502,344,000	518,372,891	20.72	Sangat Rendah
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	694,384,000	134,570,447	19.38	Sangat Rendah
Penyediaan jasa surat menyurat	1,050,000	0		
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	98,100,000	2,331,976		
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	6,210,000	0		
Penyediaan jasa administrasi keuangan	157,317,300	34,055,500		
Penyediaan jasa kebersihan kantor	35,832,800	5,927,500		
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	11,440,000	0		
Penyediaan alat tulis kantor	40,982,900	20,000,000		
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	25,325,000	6,875,000		
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5,155,000	2,967,000		
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	139,200,000	0		
Penyediaan peralatan rumah tangga	8,040,000	0		
Penyediaan makanan dan minuman	48,320,000	540,000		
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	117,411,000	61,873,471		
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	349,155,000	197,000,000	56.42	Sangat Tinggi
Pengadaan perlengkapan gedung kantor	221,875,000	197,000,000		
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	49,000,000	0		
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	72,200,000	0		
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	6,080,000	0		

Program peningkatan disiplin aparatur	77,000,000	42,900,000	55.71	Sangat Tinggi
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	38,500,000	21,450,000		
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	38,500,000	21,450,000		
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100,000,000	75,476,350	75.48	Sangat Tinggi
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	100,000,000	75,476,350		
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	9,461,000	0	0.00	Sangat Rendah
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1,461,000	0		
Penyusunan laporan keuangan semesteran	3,000,000	0		
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	5,000,000	0		
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	307,812,500	8,078,000	2.62	Sangat Rendah
Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi	138,200,000	0		
Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	169,612,500	8,078,000		
Program kerjasama informasi dan media massa	964,531,500	60,348,094	6.26	Sangat Rendah
Penyebarluasan informasi pembangunan daerah	550,000,000	8,764,824		
Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat	414,531,500	51,583,270		

Hasil evaluasi pelaksanaan program pada SKPD Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Wajib (Non Pelayanan Dasar) dengan total 7 program yang dilaksanakan, secara keseluruhan masuk dalam kategori sangat rendah dengan nilai 20,72. Hal ini dapat terlihat dari 3 program yang dikategorikan sangat tinggi, sedangkan 4 program lainnya masuk dalam kategori sangat rendah.

18. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Tabel 2.18
Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	APBD MURNI 2017 (Rp.)	REALISASI APBD MURNI 2017		KATEGORI
		SPJ (Rp.)	%	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB (Non Pelayanan Dasar)				
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	24,073,278,000	420,580,908	1.75	Sangat Rendah
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,227,576,410	238,654,518	19.44	Sangat Rendah
Penyediaan jasa surat menyurat	500,000	93,000		
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	107,032,000	31,785,131		
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	3,075,000	0		
Penyediaan jasa administrasi keuangan	175,593,850	26,002,300		
Penyediaan jasa kebersihan kantor	26,088,100	9,628,800		
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	40,610,000	10,330,000		
Penyediaan alat tulis kantor	65,806,850	13,283,450		
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	48,885,000	10,988,800		
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	14,884,799	5,959,987		
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	356,517,500	0		
Penyediaan peralatan rumah tangga	400,000	0		
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2,750,000	0		
Penyediaan makanan dan minuman	42,127,500	5,960,000		
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	343,305,811	124,623,050		
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1,157,783,240	32,709,000	2.83	Sangat Rendah
Pengadaan kendaraan dinas/operasional	375,000,000	0		
Pengadaan peralatan gedung kantor	19,880,000	0		
Pengadaan mebeleur	11,000,000	0		

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	70,800,240	0		
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	157,400,000	32,709,000		
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	6,203,000	0		
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	517,500,000	0		
Program peningkatan disiplin aparatur	66,770,000	0	0.00	Sangat Rendah
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	42,570,000	0		
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	24,200,000	0		
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	126,000,000	90,587,700	71.90	Sangat Tinggi
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	126,000,000	90,587,700		
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	8,958,750	0	0.00	Sangat Rendah
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1,006,250	0		
Penyusunan laporan keuangan semesteran	2,990,000	0		
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	4,962,500	0		
Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif	892,540,000	0	0.00	Sangat Rendah
Sosialisasi kebijakan tentang Usaha Kecil Menengah	66,377,500	0		
Fasilitasi kemudahan formalisasi badan Usaha Kecil Menengah	25,005,000	0		
Perencanaan, koordinasi dan pengembangan Usaha Kecil Menengah	367,412,500	0		
Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah	165,010,000	0		
Fasilitasi Permasalahan proses produksi Usaha Kecil Menengah	261,325,000	0		
Monitoring, evaluasi dan pelaporan	7,410,000	0		
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	281,030,000	0	0.00	Sangat Rendah
Peningkatan kerjasama di bidang HAKI	33,780,000	0		

Fasilitasi Pengembangan sarana promosi hasil produksi	136,210,000	0		
Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan	89,425,000	0		
Sosialisasi HAKI kepada Usaha Mikro Kecil Menengah	21,615,000	0		
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	186,777,500	0	0.00	Sangat Rendah
Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan	22,422,500	0		
Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro Kecil Menengah	164,355,000	0		
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	1,420,350,000	21,211,050	1.49	Sangat Rendah
Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan perkoperasian	90,782,500	0		
Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian	385,050,000	10,359,050		
Permbinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi	191,845,000	2,177,000		
Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi	528,720,000	0		
Penyebaran model-model pola pengembangan koperasi	173,140,000	0		
Monitoring, evaluasi dan pelaporan	50,812,500	8,675,000		
Program Peningkatan Iklim Usaha yang Kondusif bagi Koperasi dan UMKM	186,042,500	3,910,000	2.10	Sangat Rendah
Koordinasi dan pendataan data base WUB pengembangan UKM	186,042,500	3,910,000		
Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan	194,584,000	0	0.00	Sangat Rendah
Koordinasi peningkatan hubungan kerja dengan lembaga perlindungan konsumen	29,924,000			
Fasilitasi penyelesaian permasalahan-permasalahan pengaduan konsumen	36,380,000			
Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa	53,730,000			
Operasionalisasi dan Pengembangan UPT kemetropolitan daerah	74,550,000			
Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	149,160,000	0	0.00	Sangat Rendah

Pengenbangan informasi peluang pasar perdagangan luar negri	149,160,000			
Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	17,549,901,100	23,524,820	0.13	Sangat Rendah
Pengembangan pasar dan distribusi barang / produk	17,327,616,100	23,524,820		
Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan	222,285,000	21,874,820		
Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan	297,176,500	9,983,820	3.36	Sangat Rendah
Kegiatan penyuluhan peningkatan disiplin pedagang kakilima dan asongan	251,749,000	9,351,000		
Kegiatan penataan tempat berusaha bagi pedagang kakilima dan asongan	45,427,500	2,540,000		
Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi	158,403,000	0	0.00	Sangat Rendah
Pengembangan kapasitas pranata pengukuran, standarisasi, pengujian dan kualitas	78,403,000	0		
Pengembangan sistem inovasi teknologi industri	80,000,000	0		
Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	130,750,000	0	0.00	Sangat Rendah
Fasilitasi kerjasama kemitraan industri mikro, kecil dan menengah dengan swasta	130,750,000	0		
Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial	39,475,000	0	0.00	Sangat Rendah
penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat	39,475,000			

Hasil evaluasi pelaksanaan program pada SKPD Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah melaksanakan Urusan Pemerintahan Wajib (Non Pelayanan Dasar) dengan total 17 program yang dilaksanakan. Secara keseluruhan masuk dalam kategori sangat rendah dengan nilai 1,75. Hal ini dapat terlihat dari keseluruhan program yang ada, 1 program masuk dalam kategori sangat tinggi dan 16 program lainnya masuk dalam kategori sangat rendah.

19. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tabel 2.19
Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	APBD MURNI 2017 (Rp.)	REALISASI APBD MURNI 2017		KATEGORI
		SPJ (Rp.)	%	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB (Non Pelayanan Dasar)				
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	1,749,619,000	326,745,921	18.68	Sangat Rendah
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	943,521,200	202,320,216	21.44	Sangat Rendah
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	263,100,000	70,722,883		
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	2,200,000	502,000		
Penyediaan jasa administrasi keuangan	205,672,500	12,197,200		
Penyediaan jasa kebersihan kantor	62,137,300	22,675,700		
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	39,000,000	4,200,000		
Penyediaan alat tulis kantor	53,108,900	52,745,400		
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	201,250,000	8,475,000		
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	7,550,000	0		
Penyediaan peralatan rumah tangga	11,700,000	0		
Penyediaan makanan dan minuman	19,302,500	0		
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	78,500,000	30,802,033		
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	232,787,500	22,680,950	9.74	Sangat Rendah
Pengadaan perlengkapan gedung kantor	165,287,500	0		
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	60,000,000	19,080,950		
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	7,500,000	3,600,000		
Program peningkatan disiplin aparatur	11,820,000	11,820,000	100.00	Sangat Tinggi
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	11,820,000	11,820,000		

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	178,500,000	62,826,593	35.20	Sedang
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	178,500,000	62,826,593		
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	4,651,500	1,328,000	28.55	Rendah
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1,550,500	0		
Penyusunan laporan keuangan semesteran	1,550,500	0		
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	1,550,500	1,328,000		
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	156,390,000	0	0.00	Sangat Rendah
Peningkatan fasilitasi terwujudnya kerjasama strategis antar usaha besar dan Usaha Kecil Menengah	26,720,000	0		
Pengembangan potensi unggulan daerah	11,000,000	0		
Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal	21,670,000	0		
Penyelenggaraan pameran investasi	97,000,000	0		
Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	221,948,800	25,770,162	11.61	Sangat Rendah
Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat	221,948,800	25,770,162		

Hasil evaluasi pelaksanaan program pada SKPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Wajib (Non Pelayanan Dasar) dengan total 7 program yang dilaksanakan secara keseluruhan masuk dalam kategori Sangat Rendah dengan nilai 18,68. Hal ini dapat terlihat dari 1 program dengan kategori sangat tinggi, 1 program dengan kategori sedang, 1 program dengan kategori rendah dan 4 program masuk dalam kategori sangat rendah.

20. Dinas Kepemudaan dan Olah Raga

Tabel 2.20
Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas Kepemudaan dan Olah raga

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	APBD MURNI 2017 (Rp.)	REALISASI APBD MURNI 2017		KATEGORI
		SPJ (Rp.)	%	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB (Non Pelayanan Dasar)				
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	3,978,158,000	578,807,525	14.55	Sangat Rendah
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	682,384,000	200,319,725	29.36	Rendah
Penyediaan jasa surat menyurat	1,050,000	98,500		
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	98,100,000	16,421,725		
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	6,210,000	0		
Penyediaan jasa administrasi keuangan	157,317,300	5,989,000		
Penyediaan jasa kebersihan kantor	35,832,800	0		
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	11,440,000	0		
Penyediaan alat tulis kantor	40,982,900	4,925,000		
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	25,325,000	4,642,500		
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5,155,000	2,891,000		
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	126,800,000	124,340,000		
Penyediaan peralatan rumah tangga	8,040,000	4,070,000		
Penyediaan makanan dan minuman	48,320,000	2,500,000		
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	117,811,000	34,442,000		
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	361,155,000	274,540,000	76.02	Sangat Tinggi
Pengadaan perlengkapan gedung kantor	233,875,000	225,940,000		
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	49,000,000	48,600,000		
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	72,200,000	0		
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	6,080,000	0		
Program peningkatan disiplin aparatur	77,000,000	0	0.00	Sangat Rendah

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	38,500,000	0		
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	38,500,000	0		
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100,000,000	59,697,800	59.70	Sangat Tinggi
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	100,000,000	59,697,800		
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	9,461,000	0	0.00	Sangat Rendah
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1,461,000	0		
Penyusunan laporan keuangan semesteran	3,000,000	0		
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	5,000,000	0		
Program peningkatan peran serta kepemudaan	340,158,000		0.00	Sangat Rendah
Pembinaan Organisasi kepemudaan	223,758,000	16,500,000		
Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan	12,200,000	1,200,000		
Fasilitasi aksi bhakti sosial kepemudaan	104,200,000	0		
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	2,230,000,000	44,250,000	1.98	Sangat Rendah
Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah	2,230,000,000	44,250,000		
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	178,000,000	0	0.00	Sangat Rendah
Peningkatan pembangunan saran dan prasarana olahraga	178,000,000	0		

Hasil Evaluasi pelaksanaan program pada SKPD Dinas Kepemudaan dan Olahraga yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Wajib (Non Pelayanan Dasar) dengan 8 program. Hasil evaluasi terlihat 5 program masuk dalam kategori sangat rendah, 1 program rendah dan 2 program sangat tingi. Secara keseluruhan, evaluasi pelaksanaan program pada SKPD ini dikategorikan sangat rendah dengan nilai 14,55.

21. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Tabel 2.21
Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	APBD MURNI 2017 (Rp.)	REALISASI APBD MURNI 2017		KATEGORI
		SPJ (Rp.)	%	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB (Non Pelayanan Dasar)				
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	2,235,159,000	533,502,102	23.87	Sangat Rendah
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	768,646,500	222,169,897	28.90	Rendah
Penyediaan jasa surat menyurat	1,000,000	0		
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	237,000,000	70,421,165		
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	2,500,000	0		
Penyediaan jasa administrasi keuangan	177,126,800	53,496,000		
Penyediaan jasa kebersihan kantor	90,391,200	28,144,200		
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	29,870,000	0		
Penyediaan alat tulis kantor	31,243,500	10,402,000		
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	8,000,000	1,950,000		
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	3,500,000	0		
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	35,500,000	0		
Penyediaan peralatan rumah tangga	2,400,000	0		
Penyediaan makanan dan minuman	80,115,000	23,450,000		
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	70,000,000	34,306,532		
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	517,320,000	129,623,959	25.06	Sangat Rendah
Pembangunan gedung kantor	387,000,000	71,835,000		
Pengadaan mebeleur	76,950,000	50,050,000		
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	9,380,000	0		
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	36,500,000	5,593,959		
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	7,490,000	2,145,000		
Program peningkatan disiplin aparatur	18,000,000	0	0.00	Sangat Rendah

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	18,000,000	0		
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	107,000,000	65,981,525	61.66	Sangat Tinggi
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	107,000,000	65,981,525		
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	8,708,250	958,000	11.00	Sangat Rendah
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	958,000	958,000		
Penyusunan laporan keuangan semesteran	3,000,500	0		
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	4,749,750	0		
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	687,362,250	91,243,901	13.27	Sangat Rendah
Pemasyarakatan Minat dan Kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar	13,050,000	900,000		
Pengembangan Minat dan Budaya Baca	253,597,400	80,877,801		
Supervisi, Pembinaan dan Stimulasi pada Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus, Perpustakaan Sekolah dan Perpustakaan Masyarakat	50,862,500	0		
Penyelenggaraan Koordinasi Pengembangan Budaya Baca	18,490,000	5,625,000		
Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Budaya Baca	20,950,000	0		
Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah	315,617,350	3,841,100		
Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan	9,702,500	0		
Penyusunan Sistem Katalogisasi	2,580,000	0		
Perawatan Bahan Pustaka	2,512,500	0		
Program perbaikan sistem administrasi kearsipan	102,807,000	21,874,820	21.28	Sangat Rendah
Pengumpulan data	20,100,000	9,983,820		
Pengklasifikasikan data	31,167,000	9,351,000		
Penyusunan sistem katalog data	4,540,000	2,540,000		
Pengadaan sarana penyimpanan	47,000,000	0		
Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	8,750,000	0	0.00	Sangat Rendah

Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip	6,000,000	0		
Penduplikatan dokumen/arsip daerah dalam bentuk informatika	2,750,000	0		
Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kersipan	3,000,000	0	0.00	Sangat Rendah
Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah	3,000,000	0		
Program peningkatan kualitas pelayanan informasi	13,565,000	1,650,000	12.16	Sangat Rendah
Sosialisasi/penyuluhan kearsipan di lingkungan instansi pemerintah/swasta	7,450,000	0		
Monitoring, evaluasi dan pelaporan	6,115,000	1,650,000		

Hasil evaluasi pelaksanaan program pada SKPD Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Wajib (Non Pelayanan Dasar) dengan total 10 program yang dilaksanakan secara keseluruhan masuk dalam kategori Sangat Rendah dengan nilai 23,87. Hal ini dapat terlihat dari 1 program dengan kategori sangat tinggi, 1 program kategori rendah sedangkan 8 program lainnya masuk dalam kategori sangat rendah.

22. Dinas Perikanan

Tabel 2.22
Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas Perikanan

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	APBD MURNI 2017 (Rp.)	REALISASI APBD MURNI 2017		KATEGORI
		SPJ (Rp.)	%	
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				
DINAS PERIKANAN	14,290,903,000	960,505,446	6.72	Sangat Rendah
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,275,295,500	253,002,010	19.84	Sangat Rendah
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	162,900,000	44,820,952		
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	12,720,000	646,000		
Penyediaan jasa administrasi keuangan	365,748,500	81,931,000		
Penyediaan jasa kebersihan kantor	61,942,000	13,892,800		
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	31,650,000	0		
Penyediaan alat tulis kantor	50,000,000	15,991,300		

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	41,410,000	14,319,250		
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	15,000,000	0		
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	89,000,000	0		
Penyediaan makanan dan minuman	144,925,000	31,602,500		
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	300,000,000	49,798,208		
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1,263,770,000	77,003,000	6.09	Sangat Rendah
Pembangunan gedung kantor	683,000,000	6,000,000		
Pengadaan peralatan gedung kantor	18,000,000	18,000,000		
Pengadaan mebeleur	23,500,000	0		
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	221,400,000	0		
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	307,500,000	49,603,000		
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	10,370,000	3,400,000		
Program peningkatan disiplin aparatur	81,400,000	70,877,950	87.07	Sangat Tinggi
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	81,400,000	70,877,950		
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	123,500,000	62,475,608	50.59	Sangat Tinggi
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	123,500,000	62,475,608		
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	8,372,500	0	0.00	Sangat Rendah
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	3,289,000	0		
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	5,083,500	0		
Program pengembangan budidaya perikanan	4,480,489,000	196,033,767	4.38	Sangat Rendah
Pengembangan bibit ikan unggul	739,967,000	100,301,200		
Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan	1,074,452,800	59,994,563		
Pembinaan dan pengembangan perikanan	2,666,069,200	35,738,004		
Program Pengembangan Perikanan Tangkap	6,311,206,500	165,459,909	2.62	Sangat Rendah
Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap	1,502,793,000	119,095,709		

Pengembangan lembaga usaha perdagangan perikanan tangkap	1,745,442,800	17,495,200		
Peningkatan Perikanan Tangkap	3,062,970,700	28,869,000		
Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	746,869,500	135,653,202	18.16	Sangat Rendah
Peningkatan sarana dan prasarana rantai dingin produk perikanan	248,394,500	30,312,600		
Peningkatan sarana prasarana pengolahan tradisional	162,259,500	33,957,800		
Monitoring, evaluasi dan pengendalian program	96,375,000	28,890,000		
Pengembangan promosi dan pemasaran produk perikanan	239,840,500	42,492,802		

Hasil evaluasi pelaksanaan program pada SKPD Dinas Perikanan yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Pilihan dengan total 8 program masuk dalam kategori sangat rendah dengan nilai 6,72. Dari 8 program yang dilaksanakan 6 program masuk kategori sangat rendah dan 2 program masuk kategori sangat tinggi.

23. Dinas Pariwisata

Tabel 2.23
Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas Pariwisata

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	APBD MURNI 2017 (Rp.)	REALISASI APBD MURNI 2017		KATEGORI
		SPJ (Rp.)	%	
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				
DINAS PARIWISATA	6,988,919,000	1,539,615,064	22.03	Sangat Rendah
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	712,267,500	236,406,767	33.19	Rendah
Penyediaan jasa surat menyurat	400,000	400,000		
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	208,914,000	35,543,535		
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	4,840,000	1,168,000		
Penyediaan jasa administrasi keuangan	144,682,000	23,264,600		
Penyediaan jasa kebersihan kantor	28,039,500	9,929,200		
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	16,790,000	0		
Penyediaan alat tulis kantor	41,120,000	9,869,000		

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	20,570,000	1,148,000		
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1,232,000	0		
Penyediaan makanan dan minuman	26,930,000	0		
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	218,750,000	155,084,432		
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	205,376,000	10,749,680	5.23	Sangat Rendah
Pembangunan gedung kantor	50,600,000			
Pengadaan perlengkapan gedung kantor	20,250,000	0		
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	129,646,000	10,749,680		
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	4,880,000	0		
Program peningkatan disiplin aparatur	42,460,000	0	0.00	Sangat Rendah
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	42,460,000	0		
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	132,000,000	61,282,609	46.43	Tinggi
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	132,000,000	61,282,609		
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	679,033,000	219,221,608	32.28	Rendah
Analisa pasar untuk promosi dan pemasaran objek pariwisata	22,000,000	17,850,000		
Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata	56,975,000	5,000,000		
Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata	70,000,000	0		
Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri	530,058,000	196,371,608		
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	5,167,782,500	1,011,954,400	19.58	Sangat Rendah
Pengembangan objek pariwisata unggulan	399,206,500	155,596,800		
Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata	4,431,678,500	854,857,600		
Pengembangan daerah tujuan wisata	336,897,500	1,500,000		
Program Pengembangan Kemitraan	50,000,000	0	0.00	Sangat Rendah
Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan	50,000,000	0		

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	121,842,000	31,413,552		
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	6,054,600	0		
Penyediaan jasa administrasi keuangan	306,931,700	41,367,400		
Penyediaan jasa kebersihan kantor	126,011,100	25,728,600		
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	51,480,000	12,150,000		
Penyediaan alat tulis kantor	38,204,700	0		
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	18,440,000	11,115,000		
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	6,338,000	0		
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	90,350,000	0		
Penyediaan makanan dan minuman	58,015,000	0		
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	170,000,000	104,269,873		
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	511,425,000	19,250,000	3.76	Sangat Rendah
Pembangunan gedung kantor	212,395,000	0		
Pengadaan perlengkapan gedung kantor	35,000,000	0		
Pengadaan mebeleur	9,425,000	0		
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	45,175,000	0		
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	191,200,000	17,250,000		
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	18,230,000	2,000,000		
Program peningkatan disiplin aparatur	53,900,000	0	0.00	Sangat Rendah
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	53,900,000	0		
Program fasilitas pindah/purna tugas PNS	105,000,000	0	0.00	Sangat Rendah
Pemulangan pegawai yang pensiun	105,000,000	0		
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	213,000,000	88,323,103	41.47	Tinggi
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	213,000,000	88,323,103		
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	9,964,500	0	0.00	Sangat Rendah

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1,972,500	0		
Penyusunan laporan keuangan semesteran	2,992,000	0		
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	5,000,000	0		
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	877,625,000	495,852,792	56.50	Sangat Tinggi
Pelatihan petani dan pelaku agribisnis	184,870,000	1,200,000		
Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agrobisnis	37,335,000	2,300,000		
Peningkatan kemampuan lembaga petani	655,420,000	492,352,792		
Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	133,475,000	24,504,545	18.36	Sangat Rendah
Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggul daerah	78,800,000	10,000,000		
pengolahan informasi permintaan pasar atas hasil produksi pertanian/perkebunan masyarakat	54,675,000	14,504,545		
Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	1,823,376,800	57,119,700	3.13	Sangat Rendah
Pengadaan sarana dan prasaranan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	976,350,000	8,900,000		
Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	95,555,000	17,175,000		
Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	91,688,400	1,200,000		
Pengembangan dan Pendayagunaan Alat Mesin Pertanian	659,783,400	29,844,700		
Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	1,953,786,250	106,847,230	5.47	Sangat Rendah
Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan	158,125,000	18,250,000		
Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan	251,585,000	0		
Penyusunan kebijakan pencegahan alih fungsi lahan pertanian	132,960,000	2,450,000		
Monitoring, evaluasi dan pelaporan	30,175,000	3,324,150		
Perlindungan dan Pengamanan Produksi Pertanian dan	180,176,200	32,090,000		

Perkebunan				
Pengembangan Lahan dan Tata Guna Air Pertanian	1,101,191,000	20,359,400		
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Perkebunan	99,574,050	30,373,680		

Hasil evaluasi pelaksanaan program pada SKPD Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Pilihan dengan total 11 program, masuk dalam kategori sangat rendah dengan nilai 10,00. Dari 11 program yang dilaksanakan, 1 program dengan kategori sangat tinggi, 1 program dengan kategori tinggi dan 9 program lainnya masuk dalam kategori sangat rendah.

25. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Tabel 2.25
Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	APBD MURNI 2017 (Rp.)	REALISASI APBD MURNI 2017		KATEGORI
		SPJ (Rp.)	%	
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	6,776,777,000	866,770,462	12.79	Sangat Rendah
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,255,496,300	215,989,897	17.20	Sangat Rendah
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	147,040,000	39,596,633		
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	16,760,000	0		
Penyediaan jasa administrasi keuangan	364,952,300	64,401,900		
Penyediaan jasa kebersihan kantor	91,164,000	26,515,600		
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	17,000,000	0		
Penyediaan alat tulis kantor	51,000,000	20,625,000		
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	21,050,000	7,824,000		
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12,000,000	4,000,000		
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	234,500,000	0		
Penyediaan makanan dan minuman	150,030,000	1,800,000		

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	150,000,000	51,226,764		
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	782,950,000	33,434,165	4.27	Sangat Rendah
Pembangunan gedung kantor	211,650,000	4,400,000		
Pengadaan mebeleur	129,500,000	0		
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	90,300,000	0		
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	344,000,000	25,534,165		
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	7,500,000	3,500,000		
Program peningkatan disiplin aparatur	116,600,000	0	0.00	Sangat Rendah
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	58,300,000	0		
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	58,300,000	0		
Program fasilitas pindah/purna tugas PNS	30,000,000	0	0.00	Sangat Rendah
Pemulangan pegawai yang pensiun	30,000,000	0		
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	132,000,000	71,075,804	53.85	Sangat Tinggi
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	132,000,000	71,075,804		
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	9,110,000	0	0.00	Sangat Rendah
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	2,421,000	0		
Penyusunan laporan keuangan semesteran	2,421,000	0		
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	4,268,000	0		
Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	1,523,844,250	200,150,996	13.13	Sangat Rendah
Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak	1,123,496,750	68,027,296		
Pengawasan perdagangan ternak antar daerah	400,347,500	132,123,700		
Program peningkatan produksi hasil peternakan	2,926,776,450	346,119,600	11.83	Sangat Rendah
Pembibitan dan perawatan ternak	565,545,250	153,862,000		
Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat	1,100,048,400	56,265,600		
Pengembangan agribisnis peternakan	946,882,800	133,992,000		

Penyediaan Sarana Produksi Peternakan	314,300,000	2,000,000		
---------------------------------------	-------------	-----------	--	--

Hasil evaluasi pelaksanaan program pada SKPD Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Pilihan dengan total 8 program, masuk dalam kategori sangat rendah dengan nilai 12,79. Dari 8 program yang dilaksanakan, 1 program dengan kategori sangat tinggi 7 program lainnya masuk dalam kategori sangat rendah.

26. Sekretariat Daerah

Tabel 2.26
Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Sekretariat Daerah

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	APBD MURNI 2017 (Rp.)	REALISASI APBD MURNI 2017		KATEGORI
		SPJ (Rp.)	%	
URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				
SEKRETARIAT DAERAH	20,554,739,000	4,116,726,427	20.03	Sangat Rendah
Program pendidikan politik masyarakat	100,000,000	23,203,091	23.20	Sangat Rendah
Monitoring dan Pelaporan Pemilu	100,000,000	23,203,091		
Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	44,000,000	0	0.00	Sangat Rendah
Pemberian stimulan pembangunan desa	44,000,000	0		
Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	91,300,000	0	0.00	Sangat Rendah
Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa	71,300,000	0		
Monitoring, evaluasi dan pelaporan	20,000,000	0		
Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama	270,000,000	0	0.00	Sangat Rendah
Pelayanan Ibadah Haji	270,000,000	0		
Program Peningkatan Pemahaman, Penghayatan, Pengamalan dan Pengembangan Nilai-nilai Keagamaan	136,050,000	0	0.00	Sangat Rendah
Peningkatan pemahaman nilai-nilai keagamaan	136,050,000	0		
Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan	50,000,000	0	0.00	Sangat Rendah

Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa	50,000,000	0		
Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan	30,000,000	0	0.00	Sangat Rendah
Pengelolaan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan	30,000,000	0		
Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan	955,000,000	0	0.00	Sangat Rendah
Pembangunan/peningkatan infrastruktur tenaga listrik	955,000,000	0		
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	9,862,487,100	2,989,169,364	30.31	Rendah
Penyediaan jasa surat menyurat	6,525,000	812,000		
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	4,078,500,000	1,587,668,045		
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	290,800,000	0		
Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS, KDH/ WKDH, Pimpinan/Anggota DPRD	57,000,000	34,101,290		
Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	272,550,000	52,317,352		
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	67,950,000	14,379,700		
Penyediaan jasa administrasi keuangan	1,416,646,800	402,890,950		
Penyediaan jasa kebersihan kantor	516,477,800	53,442,500		
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	112,032,000	22,130,000		
Penyediaan alat tulis kantor	181,275,000	0		
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	180,600,000	27,400,000		
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	38,970,500	38,970,500		
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	331,675,000	74,075,000		
Penyediaan makanan dan minuman	1,250,880,500	274,772,000		
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1,060,604,500	406,210,027		
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	4,320,737,200	368,492,762	8.53	Sangat Rendah
Pembangunan gedung kantor	825,000,000	0		
Pengadaan kendaraan dinas/operasional	72,000,000	0		

Pengadaan perlengkapan gedung kantor	577,650,000	133,500,000		
Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	231,000,000	0		
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	365,000,000	0		
Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	154,800,000	15,080,251		
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	853,807,200	210,912,511		
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	52,680,000	9,000,000		
Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan	200,000,000	0		
Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas	300,000,000	0		
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	688,800,000	0		
Program peningkatan disiplin aparatur	304,700,000	0	0.00	Sangat Rendah
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	155,050,000	0		
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	149,650,000	0		
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	346,500,000	118,099,400	34.08	Sedang
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	346,500,000	118,099,400		
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	8,000,000	0	0.00	Sangat Rendah
Penyusunan laporan keuangan semesteran	3,000,000	0		
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	5,000,000	0		
Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah	1,270,864,700	213,014,519	16.76	Sangat Rendah
Dialog/ audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/ anggota organisasi sosial dan masyarakat	263,864,700	0		
Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/ departemen/ lembaga pemerintah non departemen/ luar negeri	500,000,000	33,774,767		
Kunjungan kerja/ inspeksi kepala daerah/ wakil kepala daerah	157,000,000	48,108,795		

Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya	350,000,000	131,130,957		
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	249,959,088	135,199,908	54.09	Sangat Tinggi
Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	249,959,088	135,199,908		
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	573,500,000	138,481,932	24.15	Sangat Rendah
Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan	275,000,000	51,050,000		
Publikasi peraturan perundang-undangan	43,500,000	13,300,000		
Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru, lebih tinggi dan keserasian antar peraturan perundang-undangan daerah	255,000,000	74,131,932		
Program Pembinaan dan Pelayanan Hukum	399,700,000	3,750,000	0.94	Sangat Rendah
Pemberian Bantuan Hukum	399,700,000	3,750,000		
Program Peningkatan Kesadaran dan Pemahaman Hak Asasi Manusia	74,400,000	0	0.00	Sangat Rendah
Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM)	74,400,000	0		
Program Pembinaan dan Pengembangan Organisasi	150,040,912	21,211,000	14.14	Sangat Rendah
Peningkatan dan Penataan Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah	150,040,912	21,211,000		
Program Pengembangan data/informasi	155,950,000	29,546,685	18.95	Sangat Rendah
Pelaksanaan Pelelangan Secara Elektronik (LPSE)	155,950,000	29,546,685		
Program Pengembangan Wilayah Perbatasan	189,075,000	19,865,000	10.51	Sangat Rendah
Koordinasi penyelesaian masalah perbatasan antar daerah	80,875,000	19,865,000		
Fasilitasi Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan	108,200,000	0		
Program perencanaan pembangunan daerah	972,475,000	56,692,766	5.83	Sangat Rendah
Kordinasi penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah	51,625,000	9,338,766		

Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah	79,050,000	12,380,000		
Peningkatan Kapasitas Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (ULP)	841,800,000	34,974,000		

Hasil evaluasi pelaksanaan program pada SKPD Sekretariat Daerah, yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Umum, dengan total 22 program yang dilaksanakan, secara keseluruhan masuk dalam kategori sangat rendah dengan nilai 20,03. Hal ini dapat terlihat dari 1 program dengan kategori sangat tinggi, 1 program dengan kategori sedang, 1 program dengan kategori rendah dan 19 program lainnya masuk dalam kategori sangat rendah.

27. Sekretariat DPRD

Tabel 2.27
Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Sekretariat DPRD

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	APBD MURNI 2017 (Rp.)	REALISASI APBD MURNI 2017		KATEGORI
		SPJ (Rp.)	%	
URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				
SEKRETARIAT DPRD	10,735,690,000	2,128,311,431	19.82	Sangat Rendah
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2,511,769,950	591,944,345	23.57	Sangat Rendah
Penyediaan jasa surat menyurat	300,000	65,000		
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	569,760,000	79,841,396		
Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS, KDH/ WKDH, Pimpinan/Anggota DPRD	198,090,000	44,092,638		
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	22,745,000	7,520,500		
Penyediaan jasa administrasi keuangan	703,801,200	141,572,800		
Penyediaan jasa kebersihan kantor	205,582,300	55,350,000		
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	24,310,000	0		
Penyediaan alat tulis kantor	76,970,950	25,651,200		
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	88,870,000	9,500,000		
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	26,890,500	14,000,000		

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	69,750,000	0		
Penyediaan peralatan rumah tangga	26,570,000	12,500,000		
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	10,000,000	0		
Penyediaan makanan dan minuman	246,130,000	67,300,000		
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	242,000,000	134,550,811		
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	2,413,628,000	274,346,082	11.37	Sangat Rendah
Pembangunan gedung kantor	375,000,000	100,000,000		
Pengadaan mobil jabatan	200,000,000	0		
Pengadaan perlengkapan gedung kantor	487,800,000	0		
Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	27,058,000	0		
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	99,830,000	0		
Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	112,500,000	25,620,000		
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	479,000,000	24,039,082		
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	29,940,000	0		
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	602,500,000	124,687,000		
Program peningkatan disiplin aparatur	211,470,000	0	0.00	Sangat Rendah
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	211,470,000	0		
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	108,000,000	93,284,202	86.37	Sangat Tinggi
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	108,000,000	93,284,202		
Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	5,242,622,050	1,168,736,802	22.29	Sangat Rendah
Pembahasan rancangan peraturan daerah	225,500,000	0		
Hearing/ dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/ tokoh agama	50,000,000	4,000,000		
Rapat-rapat alat kelengkapan dewan	152,900,000	39,800,000		
Rapat-rapat paripurna	143,150,000	76,500,000		
Kegiatan Reses	340,925,000	0		
Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah	315,447,050	80,665,558		

Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	3,844,600,000	967,771,244		
Sosialisasi perturan perundang-undangan	170,100,000	0		
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	248,200,000	0	0.00	Sangat Rendah
Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan	248,200,000	0		

Hasil evaluasi pelaksanaan program pada SKPD Sekretarat DPRD, yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Umum dengan total 6 program yang dilaksanakan secara keseluruhan masuk dalam kategori Sangat Rendah dengan nilai 19,82. Hal ini dapat terlihat dari 1 program dengan kategori sedang, sedangkan 5 program lainnya masuk dalam kategori sangat rendah.

28. Inspektorat Kabupaten

Tabel 2.28
Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Inspektorat Kabupaten

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	APBD MURNI 2017 (Rp.)	REALISASI APBD MURNI 2017		KATEGORI
		SPJ (Rp.)	%	
URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				
INSPEKTORAT DAERAH	3,676,950,000	640,923,075	17.43	Sangat Rendah
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	451,461,200	127,354,594	28.21	Rendah
Penyediaan jasa surat menyurat	4,025,000	1,404,000		
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	61,800,000	16,223,344		
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	3,400,000	218,000		
Penyediaan jasa administrasi keuangan	94,687,000	21,430,000		
Penyediaan jasa kebersihan kantor	30,754,200	9,122,800		
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	12,000,000	6,000,000		
Penyediaan alat tulis kantor	26,825,000	9,995,000		
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	30,400,000	10,400,000		
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	4,200,000	1,385,000		
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	46,250,000	0		
Penyediaan makanan dan minuman	12,120,000	0		

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	125,000,000	51,176,450		
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1,240,650,000	33,550,500	2.70	Sangat Rendah
Pembangunan gedung kantor	225,200,000	9,240,000		
Pengadaan perlengkapan gedung kantor	53,000,000	0		
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	23,400,000	0		
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	115,500,000	5,670,500		
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	5,750,000	655,000		
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	817,800,000	17,985,000		
Program peningkatan disiplin aparatur	50,600,000	0	0.00	Sangat Rendah
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	25,300,000	0		
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	25,300,000	0		
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	223,500,000	58,904,136	26.36	Rendah
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	223,500,000	58,904,136		
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	9,550,000	5,000,000		
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1,288,000	0		
Penyusunan laporan keuangan semesteran	3,262,000	0		
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	5,000,000	5,000,000		
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	1,338,999,500	344,331,420	25.72	Sangat Rendah
Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala	865,020,000	258,625,000		
Penanganan Kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah	19,203,000	10,800,000		
Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	454,776,500	74,906,420		
Program Peningkatan Profesionalism tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	317,000,000	51,330,700	16.19	Sangat Rendah

Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	317,000,000	51,330,700		
Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	45,189,300	20,451,725	45.26	Tinggi
Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	45,189,300	20,451,725		

Hasil evaluasi pelaksanaan program pada SKPD Inspektorat, yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Umum, dengan total 7 program yang dilaksanakan secara keseluruhan masuk dalam kategori Sangat Rendah dengan nilai 17,43. Hal ini dapat terlihat dari 1 program dengan kategori tinggi, 2 program dengan kategori rendah dan 4 program dalam kategori rendah dan sangat rendah.

29. Kecamatan Arut Selatan

Tabel 2.29
Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Kecamatan Arut Selatan

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	APBD MURNI 2017 (Rp.)	REALISASI APBD MURNI 2017		KATEGORI
		SPJ (Rp.)	%	
URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				
KECAMATAN ARUT SELATAN	2,575,040,000	400,004,157	15.53	Sangat Rendah
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,316,606,000	294,551,449	22.37	Sangat Rendah
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	180,300,000	55,033,214		
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	5,400,000	1,343,400		
Penyediaan jasa administrasi keuangan	565,527,400	141,909,500		
Penyediaan jasa kebersihan kantor	123,194,150	30,141,600		
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	45,350,000	0		
Penyediaan alat tulis kantor	73,110,318	0		
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	31,175,000	5,696,000		
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	17,164,064	0		
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	80,000,000	0		

Penyediaan makanan dan minuman	122,320,000	21,075,000		
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	73,065,068	39,352,735		
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1,023,630,000	34,002,000	3.32	Sangat Rendah
Pembangunan gedung kantor	463,400,000	0		
Pengadaan perlengkapan gedung kantor	13,700,000	0		
Pengadaan peralatan gedung kantor	92,500,000	0		
Pengadaan mebeleur	15,000,000	0		
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	85,760,000	0		
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	123,000,000	34,002,000		
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	36,770,000	0		
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	193,500,000	0		
Program peningkatan disiplin aparatur	64,900,000	0	0.00	Sangat Rendah
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	64,900,000	0		
Program fasilitas pindah/purna tugas PNS	25,000,000	0	0.00	Sangat Rendah
Pemulangan pegawai yang pensiun	25,000,000	0		
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	137,430,000	68,182,208	49.61	Sangat Tinggi
Sosialisasi peraturan perundang-undangan	29,430,000	0		
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	108,000,000	68,182,208		
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	7,474,000	3,268,500	43.73	Tinggi
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1,275,000	900,500		
Penyusunan laporan keuangan semesteran	2,135,000	0		
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	4,064,000	2,368,000		

Hasil evaluasi pelaksanaan program pada SKPD Kecamatan Arut Selatan, yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Umum dengan total 6 program yang dilaksanakan secara keseluruhan masuk dalam kategori sangat rendah dengan nilai 15,53. Hal ini dapat terlihat dari 1 program dengan kategori pencapaian sangat tinggi, 1 program dengan kategori pencapaian tinggi dan 4 program lainnya dengan kategori pencapaian sangat rendah.

30. Kecamatan Arut Utara

Tabel 2.30
Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Kecamatan Arut Utara

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	APBD MURNI 2017 (Rp.)	REALISASI APBD MURNI 2017		KATEGORI
		SPJ (Rp.)	%	
URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				
KECAMATAN ARUT UTARA	1,272,260,000	270,472,709	21.26	Sangat Rendah
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	618,086,000	150,873,901	24.41	Sangat Rendah
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	37,620,000	6,018,501		
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	5,400,000	0		
Penyediaan jasa administrasi keuangan	193,926,000	51,805,200		
Penyediaan jasa kebersihan kantor	54,147,400	15,446,200		
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	5,500,000	0		
Penyediaan alat tulis kantor	16,052,000	7,500,000		
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	7,025,000	0		
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	2,610,000	0		
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	33,700,000	0		
Penyediaan makanan dan minuman	46,050,000	6,750,000		
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	216,055,600	63,354,000		
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	479,990,000	33,862,000	7.05	Sangat Rendah
Pembangunan rumah dinan	197,440,000	0		
Pembangunan gedung kantor	148,250,000	0		
Pengadaan perlengkapan gedung kantor	12,000,000	0		
Pengadaan mebeleur	12,400,000	0		

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	103,700,000	33,862,000		
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	6,200,000	0		
Program peningkatan disiplin aparatur	19,800,000	17,050,000	86.11	Sangat Tinggi
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	19,800,000	17,050,000		
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	136,500,000	64,416,808	47.19	Sangat Tinggi
Sosialisasi peraturan perundang-undangan	6,000,000	0		
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	130,500,000	64,416,808		
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	8,499,000	2,020,000	23.77	Sangat Rendah
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	3,250,000	0		
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	5,249,000	2,020,000		
Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	9,385,000	2,250,000	23.97	Sangat Rendah
Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa	9,385,000	2,250,000		

Hasil evaluasi pelaksanaan program pada SKPD Kecamatan Arut Utara, yang melaksanakan urusan Pemerintahan Umum dengan total 6 program yang dilaksanakan secara keseluruhan masuk dalam kategori sangat rendah dengan nilai 21,26. Hal ini dapat terlihat dari 2 program dengan kategori pencapaian sangat tinggi dan 4 program lainnya masuk dalam kategori sangat rendah.

31. Kecamatan Kumai

Tabel 2.31
Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Kecamatan Kumai

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	APBD MURNI 2017 (Rp.)	REALISASI APBD MURNI 2017		KATEGORI
		SPJ (Rp.)	%	
URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				
KECAMATAN KUMAI	1,182,042,000	314,705,926	26.62	Rendah
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	902,212,000	222,702,390	24.68	Sangat Rendah
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	89,520,000	21,010,390		

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	3,430,000	708,000		
Penyediaan jasa administrasi keuangan	380,689,000	95,652,400		
Penyediaan jasa kebersihan kantor	111,483,000	30,141,600		
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	9,500,000	1,150,000		
Penyediaan alat tulis kantor	45,396,000	22,680,000		
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	31,434,000	8,150,000		
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	3,060,000	1,410,000		
Penyediaan makanan dan minuman	122,700,000	16,500,000		
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	105,000,000	25,300,000		
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	135,570,000	30,017,336	22.14	Sangat Rendah
Pembangunan gedung kantor	3,000,000	3,000,000		
Pengadaan mebeleur	4,500,000	4,200,000		
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	29,070,000	0		
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	94,800,000	22,467,336		
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	4,200,000	350,000		
Program peningkatan disiplin aparatur	37,180,000	0	0.00	Sangat Rendah
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	37,180,000	0		
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	72,000,000	61,986,200	86.09	Sangat Tinggi
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	72,000,000	61,986,200		
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	3,330,000	0	0.00	Sangat Rendah
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1,110,000	0		
Penyusunan laporan keuangan semesteran	1,110,000	0		
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	1,110,000	0		
Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	31,750,000	0	0.00	Sangat Rendah

Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa	31,750,000	0		
--	------------	---	--	--

Hasil evaluasi pelaksanaan program pada SKPD Kecamatan Kumai, yang melaksanakan urusan Pemerintahan Umum dengan total 6 program yang dilaksanakan secara keseluruhan masuk dalam kategori sangat rendah dengan nilai 26,62. Hal ini dapat terlihat dari 1 program dengan kategori pencapaian sangat tinggi, sedangkan 5 program lainnya masuk dalam kategori pencapaian sangat rendah.

32. Kecamatan Kotawaringin Lama

Tabel 2.32
Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Kecamatan Kotawaringin Lama

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	APBD MURNI 2017 (Rp.)	REALISASI APBD MURNI 2017		KATEGORI
		SPJ (Rp.)	%	
URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				
KECAMATAN KOTAWARINGIN LAMA	1,597,268,000	383,426,952	24.01	Sangat Rendah
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,024,976,500	286,197,846	27.92	Rendah
Penyediaan jasa surat menyurat	960,000	0		
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	65,640,000	22,093,871		
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	4,500,000	0		
Penyediaan jasa administrasi keuangan	418,915,500	111,346,300		
Penyediaan jasa kebersihan kantor	92,467,000	28,168,600		
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	15,590,000	5,050,000		
Penyediaan alat tulis kantor	43,314,000	18,668,000		
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	19,380,000	6,766,500		
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	8,500,000	2,000,000		
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	80,000,000	0		
Penyediaan makanan dan minuman	120,210,000	31,046,200		
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	155,500,000	61,058,375		
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	432,300,000	32,344,000	7.48	Sangat Rendah

Pembangunan gedung kantor	220,300,000	0		
Pengadaan perlengkapan gedung kantor	17,000,000	0		
Pengadaan mebeleur	58,000,000	0		
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	5,000,000	0		
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	30,000,000	0		
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	96,000,000	31,534,000		
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	6,000,000	810,000		
Program peningkatan disiplin aparatur	30,000,000	0	0.00	Sangat Rendah
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	30,000,000	0		
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	72,000,000	64,885,106	90.12	Sangat Tinggi
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	72,000,000	64,885,106		
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	5,644,000	0	0.00	Sangat Rendah
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1,704,000	0		
Penyusunan laporan keuangan semesteran	1,217,000	0		
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	2,723,000	0		
Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	32,347,500	0	0.00	Sangat Rendah
Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa	32,347,500	0		

Hasil evaluasi pelaksanaan program pada SKPD Kecamatan Kotawaringin Lama, yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Umum dengan total 6 program yang dilaksanakan secara keseluruhan masuk dalam kategori Sangat Rendah dengan nilai 24,01. Hal ini dapat terlihat dari 1 program dikategorikan pencapaian sangat tinggi, 1 program dengan kategori pencapaian rendah dan 4 program lainnya masuk dalam kategori sangat rendah.

33. Kecamatan Pangkalan Lada

Tabel 2.33
Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Kecamatan Pangkalan Lada

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	APBD MURNI 2017 (Rp.)	REALISASI APBD MURNI 2017		KATEGORI
		SPJ (Rp.)	%	
URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				
KECAMATAN PANGKALAN LADA	1,175,023,000	210,598,964	17.92	Sangat Rendah
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	607,020,200	124,559,066	20.52	Sangat Rendah
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	51,120,000	13,177,066		
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	2,800,000	0		
Penyediaan jasa administrasi keuangan	158,319,100	25,376,000		
Penyediaan jasa kebersihan kantor	59,408,900	16,899,000		
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	14,820,000	0		
Penyediaan alat tulis kantor	36,412,000	9,103,000		
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	25,450,000	9,100,000		
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	3,312,700	0		
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	83,000,000	0		
Penyediaan peralatan rumah tangga	1,000,000	0		
Penyediaan makanan dan minuman	56,377,500	10,500,000		
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	115,000,000	40,404,000		
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	427,497,300	10,343,459	2.42	Sangat Rendah
Pembangunan gedung kantor	305,487,300	0		
Pengadaan perlengkapan gedung kantor	39,700,000	3,139,400		
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	70,300,000	6,544,059		
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	4,300,000	660,000		
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	7,710,000	0		
Program peningkatan disiplin aparatur	13,200,000	13,200,000	100.00	Sangat Tinggi

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	13,200,000	13,200,000		
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	102,000,000	58,267,689	57.13	Sangat Tinggi
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	102,000,000	58,267,689		
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	10,605,500	4,228,750	39.87	Tinggi
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	2,982,000	1,643,000		
Penyusunan laporan keuangan semesteran	2,916,000	0		
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	4,707,500	2,585,750		
Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	14,700,000	0	0.00	Sangat Rendah
Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa	14,700,000	0		

Hasil evaluasi pelaksanaan program pada SKPD Kecamatan Pangkalan Lada, yang melaksanakan dengan total 6 program yang dilaksanakan secara keseluruhan masuk dalam kategori sangat rendah dengan nilai 17,92. Hal ini dapat terlihat dari 2 program dengan kategori pencapaian sangat tinggi, 1 program dengan kategori tinggi dan 3 program lainnya dengan kategori pencapaian sangat rendah.

34. Kecamatan Pangkalan Banteng

Tabel 2.34
Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Kecamatan Pangkalan Banteng

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	APBD MURNI 2017 (Rp.)	REALISASI APBD MURNI 2017		KATEGORI
		SPJ (Rp.)	%	
URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				
KECAMATAN PANGKALAN BANTENG	1,118,016,000	237,149,746	21.21	Sangat Rendah
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	493,189,000	121,726,842	24.68	Sangat Rendah
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	59,400,000	15,158,212		
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	3,450,000	0		

Penyediaan jasa administrasi keuangan	145,637,000	24,342,400		
Penyediaan jasa kebersihan kantor	55,663,400	11,634,800		
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	16,150,000	0		
Penyediaan alat tulis kantor	23,653,600	13,590,150		
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	16,475,000	5,400,000		
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	3,300,000	0		
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	2,500,000	2,300,000		
Penyediaan makanan dan minuman	34,360,000	4,655,000		
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	132,600,000	44,646,280		
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	497,800,000	75,041,700	15.07	Sangat Rendah
Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	21,400,000	0		
Pengadaan mebeleur	60,000,000	0		
Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	13,400,000	0		
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	25,600,000	0		
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	65,900,000	6,090,000		
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	6,500,000	0		
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	305,000,000	68,951,700		
Program peningkatan disiplin aparatur	14,630,000	0	0.00	Sangat Rendah
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	14,630,000	0		
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	91,215,000	40,381,204	44.27	Tinggi
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	91,215,000	40,381,204		
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	10,182,000	0	0.00	Sangat Rendah
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	2,794,000	0		
Penyusunan laporan keuangan semesteran	2,794,000	0		
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	4,594,000	0		

Program pembinaan dan fasilitas pengelolaan keuangan desa	11,000,000	0	0.00	Sangat Rendah
Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa	11,000,000	0		

Hasil evaluasi pelaksanaan program pada SKPD Kecamatan Pangkalan Banteng, yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Umum dengan total 6 program yang dilaksanakan secara keseluruhan masuk dalam kategori Sangat Rendah dengan nilai 21,21. Hal ini dapat terlihat dari program yang dilaksanakan, 1 program dengan kategori tingkat pencapaian tinggi, sedangkan 5 program lainnya masuk dalam kategori sangat rendah.

35. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Tabel 2.35
Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Bappeda

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	APBD MURNI 2017 (Rp.)	REALISASI APBD MURNI 2017		KATEGORI
		SPJ (Rp.)	%	
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	6,280,804,000	753,444,348	12.00	Sangat Rendah
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	957,783,800	278,923,201	29.12	Rendah
Penyediaan jasa surat menyurat	300,000	0		
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	232,200,000	67,884,789		
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	5,700,000	720,000		
Penyediaan jasa administrasi keuangan	209,497,000	53,564,000		
Penyediaan jasa kebersihan kantor	117,102,800	32,491,200		
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	45,250,000	3,500,000		
Penyediaan alat tulis kantor	57,464,000	13,157,500		
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	24,060,000	6,930,000		
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	8,340,000	1,920,000		
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	3,650,000	1,350,000		
Penyediaan makanan dan minuman	46,495,000	10,617,500		
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	207,725,000	86,788,212		

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1,584,890,000	39,698,690	2.50	Sangat Rendah
Pembangunan gedung kantor	1,410,900,000	6,800,000		
Pengadaan perlengkapan gedung kantor	10,000,000	0		
Pengadaan mebeleur	10,000,000	0		
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	0	0		
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	146,000,000	31,398,690		
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	7,990,000	1,500,000		
Program peningkatan disiplin aparatur	69,300,000	24,750,000	35.71	Sedang
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	34,650,000	24,750,000		
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	34,650,000	0		
Program fasilitas pindah/purna tugas PNS	20,000,000	0	0.00	Sangat Rendah
Pemulangan pegawai yang pensiun	20,000,000	0		
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	184,500,000	65,797,003	35.66	Sedang
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	184,500,000	65,797,003		
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	4,260,000	0	0.00	Sangat Rendah
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1,919,000	0		
Penyusunan laporan keuangan semesteran	125,000	0		
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	2,216,000	0		
Program Pengembangan data/informasi	47,007,500	0	0.00	Sangat Rendah
Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	47,007,500	0		
Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh	1,233,881,000	13,875,000	1.12	Sangat Rendah
Koordinasi penetapan rencana Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh	976,955,000	11,475,000		
Penyusunan perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh	256,926,000	2,400,000		

Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar	86,600,000	21,005,000	24.26	Sangat Rendah
Koordinasi perencanaan pair minum, drainase dan sanitasi perkotaan	86,600,000	21,005,000		
Program perencanaan pembangunan daerah	1,439,103,700	246,635,950	17.14	Sangat Rendah
Penyelenggaraan musrenbang RPJMD	579,511,000	65,323,200		
Penetapan RPJMD	292,586,500	16,750,500		
Penyusunan rancangan RKPD	25,551,500	0		
Penyelenggaraan musrenbang RKPD	178,751,700	95,321,250		
Penetapan RKPD	59,383,000	0		
Kordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)	64,875,000	18,530,000		
Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah	238,445,000	50,711,000		
Program perencanaan pembangunan ekonomi	117,362,500	17,232,500	14.68	Sangat Rendah
Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	117,362,500	17,232,500		
Program perencanaan sosial budaya	178,930,500	32,866,604	18.37	Sangat Rendah
Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya	114,001,500	24,668,604		
Monitoring, evaluasi dan pelaporan	64,929,000	8,198,000		
Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	357,185,000	12,660,400	3.54	Sangat Rendah
Koordinasi penyusunan masterplan prasarana perhubungan daerah	357,185,000	12,660,400		

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah total 13 program yang melaksanakan Penunjang Urusan Pemerintahan secara keseluruhan masuk dalam kategori sangat rendah dengan nilai 12,00 . Hal ini dapat terlihat dari 2 program dikategorikan sedang, 1 program masuk kategori rendah, sedangkan 10 program lainnya masuk kategori sangat rendah.

36. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Tabel 2.36
Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program BPKAD

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	APBD MURNI 2017 (Rp.)	REALISASI APBD MURNI 2017		KATEGORI
		SPJ (Rp.)	%	
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	9,323,079,000	7,431,601,803	79.71	Sangat Tinggi
Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	2,250,000,000	5,826,124,000	258.94	Sangat Tinggi
Penataan penguasaan, pemilikan , penggunaan dan pemanfaatan tanah	2,250,000,000	5,826,124,000		
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2,579,706,200	807,253,985	31.29	Rendah
Penyediaan jasa surat menyurat	1,200,000	0		
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	347,550,000	76,839,677		
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	7,410,000	4,704,600		
Penyediaan jasa administrasi keuangan	819,686,700	206,342,700		
Penyediaan jasa kebersihan kantor	141,600,000	35,036,426		
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	101,750,000	20,125,000		
Penyediaan alat tulis kantor	179,344,500	174,937,700		
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	216,680,000	19,938,750		
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	13,250,000	6,370,000		
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	259,925,000	41,122,500		
Penyediaan makanan dan minuman	131,310,000	46,412,500		
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	360,000,000	175,424,132		
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1,765,636,200	321,753,679	18.22	Sangat Rendah
Pembangunan gedung kantor	498,600,000	3,750,000		
Pengadaan kendaraan dinas/operasional	396,460,000	0		
Pengadaan perlengkapan gedung kantor	132,250,000	0		

Pengadaan peralatan gedung kantor	319,000,000	299,011,988		
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	42,840,000	0		
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	348,286,200	12,791,691		
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	28,200,000	6,200,000		
Program peningkatan disiplin aparatur	95,850,000	0	0.00	Sangat Rendah
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	48,550,000	0		
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	47,300,000	0		
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	479,000,000	356,064,355	74.33	Sangat Tinggi
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	479,000,000	356,064,355		
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	82,500,000	0	0.00	Sangat Rendah
Penyusunan laporan keuangan semesteran	82,500,000	0		
Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	2,070,386,600	120,405,784	5.82	Sangat Rendah
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD	265,902,000	48,383,384		
Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	53,250,000	0		
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD	156,025,000	0		
Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	52,500,000	0		
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	388,042,800	40,068,200		
Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	35,000,000	0		
Bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah	18,075,000	16,800,000		
Peningkatan manajemen aset/ barang daerah	740,000,000	12,304,200		

Revaluasi/ appraisal aset/ barang daerah	115,000,000	1,350,000		
Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Daerah	246,591,800	1,500,000		

Hasil evaluasi pelaksanaan program pada SKPD Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, yang melaksanakan Penunjang Urusan Pemerintahan dengan total 7 program yang dilaksanakan secara keseluruhan masuk dalam kategori Sangat Rendah dengan nilai 79,71. Hal ini dapat terlihat dari program yang dilaksanakan, 2 program dengan kategori sangat tinggi, 1 program dengan kategori rendah, sedangkan 4 program lainnya masuk dalam kategori sangat rendah.

37. Badan Pendapatan Daerah

Tabel 2.37
Evaluasi Capaian Pelaksanaan Badan Pendapatan Daerah

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	APBD MURNI 2017 (Rp.)	REALISASI APBD MURNI 2017		KATEGORI
		SPJ (Rp.)	%	
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
BADAN PENDAPATAN DAERAH	4,767,286,000	626,006,301	13.13	Sangat Rendah
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,616,853,000	340,062,925	21.03	Sangat Rendah
Penyediaan jasa surat menyurat	1,200,000	99,500		
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	137,550,000	17,795,733		
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	5,925,000	0		
Penyediaan jasa administrasi keuangan	361,243,500	67,205,900		
Penyediaan jasa kebersihan kantor	141,600,000	27,661,916		
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	94,750,000	0		
Penyediaan alat tulis kantor	168,844,500	104,617,500		
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	105,880,000	20,255,000		
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	13,250,000	0		
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	208,400,000	0		
Penyediaan makanan dan minuman	108,210,000	12,770,000		

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	270,000,000	89,657,376		
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	881,662,100	15,910,000	1.80	Sangat Rendah
Pengadaan kendaraan dinas/operasional	500,000,000	0		
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	62,594,000	0		
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	310,068,100	15,910,000		
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	9,000,000	0		
Program peningkatan disiplin aparatur	55,000,000	55,000,000	100.00	Sangat Tinggi
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	55,000,000	55,000,000		
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	430,500,000	94,160,133	21.87	Sangat Rendah
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	430,500,000	94,160,133		
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	9,461,000	0	0.00	Sangat Rendah
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1,461,000	0		
Penyusunan laporan keuangan semesteran	3,000,000	0		
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	5,000,000	0		
Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	1,773,809,900	120,873,243	6.81	Sangat Rendah
Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumberpendapatan daerah	1,261,809,900	120,873,243		
Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Daerah	512,000,000	0		

Hasil evaluasi pelaksanaan program pada SKPD Badan Pendapatan Daerah, yang melaksanakan Penunjang Urusan Pemerintahan dengan total 6 program yang dilaksanakan secara keseluruhan masuk dalam kategori Sangat Rendah dengan nilai 13,13. Hal ini dapat terlihat dari program yang dilaksanakan, 1 program dengan kategori sangat tinggi, sedangkan 5 program lainnya masuk dalam kategori sangat rendah.

38. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Tabel 2.38
Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	APBD MURNI 2017 (Rp.)	REALISASI APBD MURNI 2017		KATEGORI
		SPJ (Rp.)	%	
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	5,940,579,000	1,194,892,917	20.11	Sangat Rendah
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,019,092,200	348,714,017	34.22	Sedang
Penyediaan jasa surat menyurat	1,365,100	0		
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	159,000,000	53,795,179		
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	6,300,000	1,547,500		
Penyediaan jasa administrasi keuangan	359,751,900	87,687,500		
Penyediaan jasa kebersihan kantor	66,890,700	27,501,600		
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	8,990,000	0		
Penyediaan alat tulis kantor	85,441,500	84,526,200		
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	25,398,000	5,014,750		
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	9,230,000	9,200,000		
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	39,400,000	0		
Penyediaan peralatan rumah tangga	5,590,000	5,570,000		
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2,000,000	0		
Penyediaan makanan dan minuman	49,735,000	6,440,000		
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	200,000,000	67,431,288		
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	608,399,300	118,280,600	19.44	Sangat Rendah
Pengadaan perlengkapan gedung kantor	107,900,000	98,560,000		
Pengadaan peralatan gedung kantor	3,400,000	0		
Pengadaan mebeleur	5,400,000	0		
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	37,000,000	0		

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	127,600,000	9,127,000		
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	16,099,300	4,862,600		
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	311,000,000	5,731,000		
Program peningkatan disiplin aparatur	53,800,000	44,440,000	82.60	Sangat Tinggi
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	53,800,000	44,440,000		
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	104,000,000	55,683,004	53.54	Sangat Tinggi
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	104,000,000	55,683,004		
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	18,820,000	0	0.00	Sangat Rendah
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	6,150,000	0		
Penyusunan laporan keuangan semesteran	4,570,000	0		
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	8,100,000	0		
Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	1,637,599,000	230,343,611	14.07	Sangat Rendah
Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah	373,944,000	3,660,000		
Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah	682,925,000	104,601,011		
Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS daerah	340,705,000	122,082,600		
Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS Daerah	240,025,000	0		
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	2,498,868,500	397,431,685	15.90	Sangat Rendah
Penyusunan rencana pembinaan karir PNS	246,370,000	67,600,482		
Seleksi penerimaan calon PNS	268,820,000	31,156,502		
Penempatan PNS	149,713,500	14,087,000		
Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS	184,450,000	62,283,451		
Pembangunan/Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah	97,310,000	31,722,000		
Seleksi dan penetapan PNS untuk tugas belajar	32,000,000	19,687,900		
Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi	129,025,000	43,558,200		

Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS	111,650,000	8,905,002		
Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas	1,168,680,000	117,231,148		
Pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan Praja IPDN	4,200,000	1,200,000		
Monitoring, evaluasi dan pelaporan	106,650,000	0		

Hasil evaluasi pelaksanaan program pada SKPD Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, yang melaksanakan Penunjang Urusan Pemerintahan dengan total 7 program yang dilaksanakan secara keseluruhan masuk dalam kategori Sangat Rendah dengan nilai 20,11. Hal ini dapat terlihat dari 2 program dengan kategori sangat tinggi, 1 program dengan kategori sedang, sedangkan 4 program lainnya masuk dalam kategori sangat rendah.

Secara umum evaluasi capaian pelaksanaan program pada seluruh SKPD sampai dengan triwulan II dengan kategori sangat rendah, hal ini dapat dilihat dari total Rp. 676,410,364,000,- Belanja Langsung, baru terserap sebesar Rp. 102,981,753,424,- atau 15,22 %. Penjelasan lebih rinci dapat dilihat pada tabel 2.39 berikut :

Tabel 2.39
Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Belanja Langsung SKPD

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	APBD MURNI 2017 (Rp.)	REALISASI APBD MURNI 2017		Kategori
			SPJ (Rp.)	(%)	
	2	3	4	5	6
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	46,025,428,000	3,122,712,936	6.78	Sangat Rendah
2	DINAS KESEHATAN	62,538,259,000	6,915,361,673	11.06	Sangat Rendah
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	131,570,444,000	27,642,672,781	21.01	Sangat Rendah
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	232,858,913,000	30,308,205,750	13.02	Sangat Rendah
5	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	3,712,520,000	305,184,836	8.22	Sangat Rendah
6	SATPOL PP DAN DAMKAR	5,232,762,000	1,308,393,989	25.00	Sangat Rendah
7	BADAN KESBANGPOL	2,573,549,000	513,811,925	19.97	Sangat Rendah
8	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	3,831,121,000	333,953,637	8.72	Sangat Rendah
9	DINAS SOSIAL	2,277,329,000	406,471,461	17.85	Sangat Rendah
10	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	4,804,392,000	737,493,685	15.35	Sangat Rendah

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	APBD MURNI 2017 (Rp.)	REALISASI APBD MURNI 2017		Kategori
			SPJ (Rp.)	(%)	
	2	3	4	5	6
11	DP3A,DALDUK KB	4,062,260,000	429,891,414	10.58	Sangat Rendah
12	DINAS KETAHANAN PANGAN	2,017,713,000	412,447,083	20.44	Sangat Rendah
13	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	12,458,183,000	3,561,506,651	28.59	Rendah
14	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	2,520,624,000	320,888,084	14.54	Sangat Rendah
15	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	3,740,671,000	769,138,342	20.56	Sangat Rendah
16	DISHUB	11,032,101,000	957,856,259	8.68	Sangat Rendah
17	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	2,502,344,000	518,372,891	20.72	Sangat Rendah
18	DISPERINDAGKOP UKM	24,073,278,000	420,580,908	1.75	Sangat Rendah
19	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	1,749,619,000	326,745,921	18.68	Sangat Rendah
20	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	3,978,158,000	578,807,525	14.55	Sangat Rendah
21	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	2,235,159,000	533,502,102	23.83	Sangat Rendah
22	DINAS PERIKANAN	14,290,903,000	960,505,446	6.72	Sangat Rendah
23	DINAS PARIWISATA	6,988,919,000	1,539,615,064	22.03	Sangat Rendah
24	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	12,360,162,000	1,236,042,191	10.00	Sangat rendah
25	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	6,776,777,000	866,770,462	12.79	Sangat rendah
26	SEKRETARIAT DAERAH	20,554,739,000	4,116,726,427	20.03	Sangat Rendah
27	SEKRETARIAT DPRD	10,735,690,000	2,128,311,431	19.82	Sangat Rendah
28	INSPEKTORAT KABUPATEN	3,676,950,000	640,923,075	17.43	Sangat Rendah
29	KECAMATAN ARUT SELATAN	2,575,040,000	400,004,157	9.08	Sangat Rendah
30	KECAMATAN ARUT UTARA	1,272,260,000	270,472,709	19.74	Sangat Rendah
31	KECAMATAN KUMAI	1,182,042,000	314,705,926	17.75	Sangat Rendah
32	KECAMATAN KOTAWARINGIN LAMA	1,597,268,000	383,426,952	24.01	Sangat Rendah
33	KECAMATAN PANGKALAN LADA	1,175,023,000	210,598,964	17.92	Sangat Rendah
34	KECAMATAN PANGKALAN BANTENG	1,118,016,000	237,149,746	21.21	Sangat Rendah
35	BAPPEDA	6,280,804,000	753.444.348	12,00	Sangat Rendah

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	APBD MURNI 2017 (Rp.)	REALISASI APBD MURNI 2017		Kategori
			SPJ (Rp.)	(%)	
	2	3	4	5	6
36	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	9,323,079,000	7,431,601,803	79.71	Sangat Tinggi
37	BADAN PENDAPATAN DAERAH	4,767,286,000	626,006,301	13.13	Sangat Rendah
38	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	5,940,579,000	1,194,892,917	20.11	Sangat Rendah
JUMLAH		676,410,364,000	102,981,753,424	15.22	Sangat Rendah

BAB III

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH DALAM PERUBAHAN RKPD

Pada bab ini akan dibahas tentang rancangan program dan kegiatan prioritas dalam RKPD Perubahan Tahun 2017 Kabupaten Kotawaringin Barat, yang berisi tentang perubahan pendapatan, perubahan belanja, perubahan pembiayaan, perubahan anggaran berbasis SKPD serta program dan kegiatan yang berubah (bertambah dan berkurang) tahun 2017.

Penyusunan RKPD Perubahan Tahun 2017 ini diperlukan sebagai bahan utama dalam penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Perubahan Plafon Pagu Anggaran Sementara Tahun 2017. Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2017 memuat di antaranya :

- a. Perbedaan asumsi dengan Kebijakan Umum Anggaran yang ditetapkan sebelumnya;
- b. Program dan Kegiatan yang dapat diusulkan untuk ditampung dalam Perubahan APBD Tahun 2017 dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD Perubahan, yang sangat dibutuhkan dan disesuaikan dengan skala prioritas; dan
- c. Capaian target kinerja program dan kegiatan yang berubah, baik berkurang atau bertambah karena kondisi yang berubah dari penetapan target sebelumnya.

3.1. Perubahan Pendapatan

Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah diarahkan pada :

- a. Penyesuaian Pendapatan Asli Daerah (perkiraan terukur secara rasional yang dapat dicapai serta realisasi sampai dengan semester 1 tahun 2017);
- b. Penyesuaian kebijakan dana perimbangan (sumber pemerintah pusat;
- c. Penyesuaian alokasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah (sumber pemerintah provinsi).

Proyeksi perubahan penerimaan pendapatan daerah tahun 2017 dapat dilihat pada Tabel 3.1 sebagai berikut :

Tabel 3.1.
Proyeksi Perubahan Penerimaan Pendapatan Daerah Tahun 2017

NO.	URAIAN	APBD TAHUN 2017 (Rp.)	RKPD PERUBAHAN TAHUN 2017 (Rp.)	BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp.)	%
1	Pendapatan Asli Daerah	154.892.190.000	186.060.863.500	31.168.673.500	20,12
2	Dana Perimbangan	953.269.044.000	924.537.311.000	(28.731.733.000)	(3,01)
3	Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	203.621.002.500	204.221.002.500	600.000.000	0,29
JUMLAH		1.311.782.236.500	1.314.819.177.000	3.036.940.500	0,23

Berdasarkan Tabel 3.1 di atas terlihat bahwa komposisi Perubahan Pendapatan Daerah Tahun 2017 meningkat sebesar Rp.3.036.940.500,- atau 0,23% dari anggaran pendapatan daerah sebelum perubahan, yakni sebesar Rp.1.311.782.236.500,- menjadi Rp.1.314.819.177.000,- yang terdiri dari :

- a. Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 186.060.863.500,- (20,12 %),
- b. Dana Perimbangan sebesar Rp. 924.537.311.000,- (-3,01 %); dan
- c. Pendapatan Lain Yang Sah sebesar Rp. 204.221.002.500,- (0,29 %).

Proyeksi perubahan komponen Pendapatan Asli Daerah tahun 2017 dapat dilihat pada Tabel 3.2 sebagai berikut :

Tabel 3.2
Proyeksi Perubahan Komponen Pendapatan Asli Daerah Tahun 2017

NO.	URAIAN	APBD TAHUN 2017 (Rp.)	RKPD PERUBAHAN TAHUN 2017 (Rp.)	BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp.)	%
4.1	Pendapatan Asli Daerah	154.892.190.000	186.060.863.500	31.168.673.500	20,12
4.1.1	Pajak Daerah	44.980.000.000	46.180.000.000	1.200.000.000	2,67
4.1.2	Retribusi Daerah	15.546.206.000	13.622.819.500	(1.923.386.500)	(12,37)
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.265.000.000	8.110.574.000	845.574.000	11,64
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	87.100.984.000	118.147.470.000	31.046.486.000	35,64

Berdasarkan tabel 3.2 di atas, pada RKPD Perubahan Tahun 2017, komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 186.060.863.500,- terdiri dari :

- a. Pajak daerah sebesar Rp. 46.180.000.000,-
- b. Retribusi daerah sebesar Rp. 13.622.819.500,-
- c. Hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp. 8.110.574.000,-
- d. Lain-lain PAD yang sah sebesar Rp. 118.147.470.000,-

Komponen pembentuk Pendapatan Asli Daerah pada perubahan RKPD ini mengalami kenaikan meliputi : Pajak Daerah , Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan komponen Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Namun Retribusi Daerah mengalami penurunan.

Proyeksi perubahan komponen Dana Perimbangan tahun 2017 dapat dilihat pada Tabel 3.3 sebagai berikut :

Tabel 3.3
Proyeksi Perubahan Komponen Dana Perimbangan Tahun 2017

NO.	URAIAN	APBD TAHUN 2017 (Rp.)	RKPD PERUBAHAN TAHUN 2017 (Rp.)	BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp.)	%
4.2	Dana Perimbangan	953.269.044.000	924.537.311.000	(28.731.733.000)	(3,01)
4.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	68.077.342.000	69.242.980.000	1.165.638.000	1,71
4.2.2	Dana Alokasi Umum	662.249.343.000	632.448.122.000	(29.801.221.000)	(4,50)
4.2.3	Dana Alokasi Khusus	222.942.359.000	222.846.209.000	(96.150.000)	(0,04)

Berdasarkan tabel 3.3. di atas, komponen dana perimbangan mengalami penurunan sebesar 3,01 % dari semula Rp. 953.269.044.000,- menjadi Rp. 924.537.311.000,- yang terdiri dari :

- a. Bagi hasil pajak/Bagi hasil bukan pajak, dari Rp. 68.077.342.000,- mengalami peningkatan menjadi Rp. 69.242.980.000,00;
- b. Dana alokasi umum, dari Rp. 662.249.343.000,- mengalami penurunan menjadi Rp. 632.448.122.000,00; dan
- c. Dana alokasi khusus, dari Rp. 222.942.359.000,- mengalami penurunan menjadi Rp. 222.846.209.000,00.

Proyeksi perubahan komponen Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah tahun 2017 dapat dilihat pada Tabel 3.4 berikut :

Tabel 3.4
Proyeksi Perubahan Komponen Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2017

NO.	URAIAN	APBD TAHUN 2017 (Rp.)	RKPD PERUBAHAN TAHUN 2017 (Rp.)	BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp.)	%
4.3	Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	203.621.002.500	204.221.002.500	600.000.000	0,29
4.3.1	Pendapatan Hibah	3.000.000.000	3.600.000.000	600.000.000	20,00
4.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	65.452.716.500	65.452.716.500	-	-
4.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	121.363.286.000	121.363.286.000	-	-
4.3.6	Sumbangan Pihak Ketiga	13.805.000.000	13.805.000.000	-	-

Berdasarkan tabel 3.4 di atas, komponen Lain-lain pendapatan daerah yang sah pada RKPD Perubahan Tahun 2017 mengalami peningkatan tipis namun secara umum tidak berubah, hanya pada Pendapatan Hibah yang mengalami peningkatan dari semula Rp. 3.000.000.000,- menjadi Rp. 3.600.000.000,- (naik sebesar Rp. 600.000.000,-).

3.2. Perubahan Belanja

Perubahan Kebijakan Belanja Daerah diarahkan pada :

- a. Penyesuaian perhitungan anggaran belanja pegawai pada belanja tidak langsung,
- b. Pergeseran anggaran antar SKPD, antar kegiatan dan antar jenis belanja, antar obyek belanja dan antar rincian obyek yang disebabkan capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus dikurangi atau ditambah dalam perubahan APBD apabila asumsi kebijakan umum anggaran tidak dapat tercapai atau melampaui asumsi KUA,
- c. Pergeseran anggaran antar SKPD menyesuaikan Tugas Pokok dan Fungsi SKPD yang baru dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat,

- d. Penyesuaian dengan kebijakan dari pemerintah, terutama yang terkait dengan alokasi dana transfer dari Pemerintah Pusat,
- e. Mengimplementasikan kebijakan visi, misi dan program unggulan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Barat,
- f. Menuangkan kembali anggaran mendahului perubahan APBD TA. 2017.

Untuk lebih jelasnya mengenai proyeksi perubahan belanja daerah tahun 2017 dapat terlihat pada Tabel 3.5 sebagai berikut :

Tabel 3.5
Proyeksi Perubahan Belanja Daerah Tahun 2017

NO.	URAIAN	APBD TAHUN 2017 (Rp.)	RKPD PERUBAHAN TAHUN 2017 (Rp.)	BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp.)	%
5	BELANJA DAERAH	1.306.218.123.500	1.344.677.048.000	38.458.924.500	2,94
5.1	Belanja Tidak Langsung	629.807.759.500	611.975.335.000	(17.832.424.500)	(2,83)
5.1.1	Belanja Pegawai	446.861.667.000	432.285.059.000	(14.576.608.000)	(3,26)
5.1.4	Belanja Hibah	26.465.365.000	23.696.865.000	(2.768.500.000)	(10,46)
5.1.5	Belanja Bantuan Sosial	2.448.000.000	2.448.000.000	-	-
5.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	6.052.621.000	8.430.830.000	2.378.209.000	39,29
5.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik	142.566.455.500	143.114.581.000	548.125.500	0,38
5.1.8	Belanja Tidak Terduga	5.413.651.000	2.000.000.000	(3.413.651.000)	(63,06)
5.2	Belanja Langsung	676.410.364.000	732.701.713.000	56.291.349.000	8,32

Berdasarkan Tabel 3.5 di atas terlihat bahwa proporsi **belanja tidak langsung perubahan tahun 2017** adalah mengalami **penurunan** sebesar 2,83 % (Rp. 17.832.424.500,00) dari sebelum perubahan sebesar Rp. 629.807.759.500,00 menjadi Rp. 611.975.335.000,00 pada Perubahan Tahun 2017. Pada komponen belanja tidak langsung masih didominasi oleh belanja pegawai sebesar Rp. 432.285.059.000,00. Adapun proporsi **belanja langsung perubahan tahun 2017** mengalami **peningkatan** sebesar 8,32% (Rp. 56.291.349.000,00) dari sebelum perubahan sebesar Rp. 676.410.364.000,00 menjadi Rp. 732.701.713.000,00 pada Perubahan Tahun 2017.

Penambahan pada belanja tidak langsung terjadi pada pos Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa meningkat sebesar Rp. 2.378.209.000,00 dari semula Rp. 6.052.621.000,00 menjadi Rp. 8.430.830.000,00 (39,29 %) dan Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik naik sebesar Rp. 548.125.500,00 dari semula Rp. 142.566.455.500,00 menjadi Rp. 143.114.581.000,00 (0,38 %).

Secara keseluruhan jumlah belanja daerah pada perubahan tahun 2017 mengalami kenaikan 2,94 % (Rp. 38.458.924.500,00) dari sebelum perubahan sebesar Rp. 1.306.218.123.500,00 menjadi Rp. 1.344.677.048.000,00 pada Perubahan Tahun 2017.

3.3. Perubahan Pembiayaan

Perubahan kebijakan pembiayaan daerah, diarahkan pada :

- a. Penerimaan pembiayaan, pada SiLPA Tahun 2016 dialokasikan untuk belanja daerah Perubahan Tahun 2017 kecuali SiLPA Dana Reboisasi dan sebagian dari SiLPA BLUD. Untuk SiLPA yang bersifat khusus dialokasikan sesuai peruntukannya, sedangkan untuk SiLPA bersifat umum dialokasikan untuk pelaksanaan program prioritas pada Perubahan APBD TA. 2017; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan pada perubahan APBD TA. 2017 diarahkan sebagai penyertaan modal kepada Bank Pembangunan Kalteng dan perusahaan daerah Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Secara lebih detail berkaitan dengan proyeksi perubahan pembiayaan daerah tahun 2017 terlihat pada Tabel 3.6 sebagai berikut :

Tabel 3.6
Proyeksi Perubahan Pembiayaan Daerah Tahun 2017

NO.	URAIAN	APBD TAHUN 2017 (Rp.)	RKPD PERUBAHAN TAHUN 2017 (Rp.)	BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp.)	%
6	PEMBIAYAAN DAERAH	(5.564.113.000,00)	90.305.035.000,00	95.869.148.000,00	(1.722,69)
6.1	Penerimaan Pembiayaan Daerah	4.435.887.000,00	100.305.035.000,00	95.869.148.000,00	2.161,22
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)	4.435.887.000,00	100.305.035.000,00	95.869.148.000,00	2.161,22
6.2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	0,00	-
6.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	0,00	-
	PEMBIAYAAN NETTO	(5.564.113.000,00)	90.305.035.000,00	95.869.148.000,00	(1.722,69)
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA)	0	60.447.164.000	60.447.164.000	100

Berdasarkan tabel 3.6 di atas terlihat bahwa pembiayaan *netto* mengalami surplus/defisit sebesar Rp. 90.305.035.000,00 digunakan untuk menutup kondisi keuangan APBD Kabupaten Kotawaringin Barat pada perubahan tahun 2017 yang mengalami defisit Rp. 90.305.035.000,00. Maka Rencana APBD Kabupaten Kabupaten Kotawaringin Barat perubahan Tahun 2017 akan mengalami Anggaran Berimbang.

3.4. Perubahan Anggaran Berdasarkan SKPD

Plafon anggaran sementara perubahan APBD TA. 2017 berdasarkan masing-masing urusan dan SKPD untuk belanja langsung dapat dilihat pada tabel 3.7 di bawah ini.

Tabel 3.7
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN APBD
MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2017

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PLAFON ANGGARAN (Rp.)			Ket.
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / (BERKURANG)	
1	2	3	4	5	6
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB (Pelayanan Dasar)	788,871,899,225.00	823,714,329,700.00	34,842,430,475.00	
1.01	Pendidikan				
1.01.1.01.01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan				
	- Belanja Tidak Langsung	211,887,785,675.00	209,829,544,000.00	(2,058,241,675.00)	
	- Belanja Langsung	42,774,154,200.00	78,545,294,200.00	35,771,140,000.00	
1.02	Kesehatan				
1.02.1.02.01	Dinas Kesehatan				
	- Belanja Tidak Langsung	40,964,825,000.00	39,885,662,000.00	(1,079,163,000.00)	
	- Belanja Langsung	62,538,259,000.00	66,204,909,000.00	3,666,650,000.00	
1.02.1.02.02	Rumah Sakit Umum Daerah				
	- Belanja Tidak Langsung	24,759,291,000.00	24,696,261,000.00	(63,030,000.00)	
	- Belanja Langsung	131,570,444,000.00	129,320,204,000.00	(2,250,240,000.00)	
1.03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				
1.03.1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				
	- Belanja Tidak Langsung	7,386,341,350.00	6,334,639,000.00	(1,051,702,350.00)	
	- Belanja Langsung	232,858,913,000.00	233,902,472,000.00	1,043,559,000.00	
1.04	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman				
2.04.1.04.01	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman				
	- Belanja Tidak Langsung	3,256,456,000.00	2,324,732,000.00	(931,724,000.00)	
	- Belanja Langsung	3,562,520,000.00	3,771,725,500.00	209,205,500.00	
2.04.1.04.02	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran				
	- Belanja Tidak Langsung	0.00	0.00	0.00	
	- Belanja Langsung	1,386,925,500.00	1,274,201,500.00	(112,724,000.00)	
1.05	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat				
1.05.1.05.01	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran				
	- Belanja Tidak Langsung	3,825,495,000.00	6,127,121,000.00	2,301,626,000.00	
	- Belanja Langsung	3,845,836,500.00	4,152,569,500.00	306,733,000.00	
1.05.1.05.02	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik				
	- Belanja Tidak Langsung	3,139,193,000.00	2,777,237,000.00	(361,956,000.00)	

	- <i>Belanja Langsung</i>	2,573,549,000.00	2,857,759,000.00	284,210,000.00	
1.05.1.05.03	Badan Penanggulangan Bencana Daerah				
	- <i>Belanja Tidak Langsung</i>	3,127,058,000.00	2,415,440,000.00	(711,618,000.00)	
	- <i>Belanja Langsung</i>	3,831,121,000.00	3,664,234,000.00	(166,887,000.00)	
1.05.1.05.04	Sekretariat Daerah				
	- <i>Belanja Tidak Langsung</i>	0.00	0.00	0.00	
	- <i>Belanja Langsung</i>	100,000,000.00	57,000,000.00	(43,000,000.00)	
1.06	Sosial				
1.06.1.06.01	Dinas Sosial				
	- <i>Belanja Tidak Langsung</i>	3,206,403,000.00	3,295,996,000.00	89,593,000.00	
	- <i>Belanja Langsung</i>	2,277,329,000.00	2,277,329,000.00	0.00	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB (Non Pelayanan Dasar)	119,152,058,125.00	119,800,263,139.00	648,205,014.00	
2.01	Tenaga Kerja				
2.01.2.01.01	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi				
	- <i>Belanja Tidak Langsung</i>	3,797,996,000.00	3,446,837,000.00	(351,159,000.00)	
	- <i>Belanja Langsung</i>	4,193,432,000.00	4,193,432,000.00	0.00	
2.02	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				
2.02.2.02.01	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				
	- <i>Belanja Tidak Langsung</i>	4,789,911,000.00	4,696,381,000.00	(93,530,000.00)	
	- <i>Belanja Langsung</i>	3,587,410,500.00	3,470,233,500.00	(117,177,000.00)	
2.02.2.02.02	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				
	- <i>Belanja Tidak Langsung</i>	0.00	0.00	0.00	
	- <i>Belanja Langsung</i>	545,718,400.00	548,318,400.00	2,600,000.00	
2.03	Pangan				
2.03.2.03.01	Dinas Ketahanan Pangan				
	- <i>Belanja Tidak Langsung</i>	12,713,093,000.00	11,037,724,000.00	(1,675,369,000.00)	
	- <i>Belanja Langsung</i>	1,498,137,800.00	1,516,638,000.00	18,500,200.00	
2.03.2.03.02	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan				
	- <i>Belanja Tidak Langsung</i>	0.00	0.00	0.00	
	- <i>Belanja Langsung</i>	5,683,096,150.00	4,379,446,150.00	(1,303,650,000.00)	
2.04	Pertanahan				
2.04.1.04.01	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman				
	- <i>Belanja Tidak Langsung</i>	0.00	0.00	0.00	
	- <i>Belanja Langsung</i>	150,000,000.00	139,800,000.00	(10,200,000.00)	
5.02.5.02.02	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah				
	- <i>Belanja Tidak Langsung</i>	0.00	-	0.00	
	- <i>Belanja Langsung</i>	2,250,000,000.00	6,080,050,000.00	3,830,050,000.00	
2.05	Lingkungan Hidup				
2.05.2.05.01	Dinas Lingkungan Hidup				
	- <i>Belanja Tidak Langsung</i>	3,062,102,975.00	3,021,130,000.00	(40,972,975.00)	

	- <i>Belanja Langsung</i>	12,458,183,000.00	12,468,045,000.00	9,862,000.00	
2.06	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil				
2.06.2.06.01	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil				
	- <i>Belanja Tidak Langsung</i>	2,931,384,000.00	3,227,213,000.00	295,829,000.00	
	- <i>Belanja Langsung</i>	2,520,624,000.00	2,520,624,000.00	0.00	
2.07	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				
2.07.2.07.01	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				
	- <i>Belanja Tidak Langsung</i>	3,325,943,000.00	3,494,022,000.00	168,079,000.00	
	- <i>Belanja Langsung</i>	3,194,952,600.00	3,192,352,600.00	(2,600,000.00)	
2.07.2.07.02	Sekretariat Daerah				
	- <i>Belanja Tidak Langsung</i>	0.00	0.00	0.00	
	- <i>Belanja Langsung</i>	135,300,000.00	178,300,000.00	43,000,000.00	
2.02	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				
2.02.2.02.01	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				
	- <i>Belanja Tidak Langsung</i>	0.00	0.00	0.00	
	- <i>Belanja Langsung</i>	474,849,500.00	596,094,500.00	121,245,000.00	
2.09	Perhubungan				
2.09.2.09.01	Dinas Perhubungan				
	- <i>Belanja Tidak Langsung</i>	4,365,713,000.00	3,409,589,000.00	(956,124,000.00)	
	- <i>Belanja Langsung</i>	11,032,101,000.00	11,047,712,000.00	15,611,000.00	
2.10	Komunikasi dan Informatika				
2.10.2.10.01	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian				
	- <i>Belanja Tidak Langsung</i>	3,263,956,000.00	3,036,483,000.00	(227,473,000.00)	
	- <i>Belanja Langsung</i>	2,502,344,000.00	2,714,974,000.00	212,630,000.00	
2.10.2.10.02	Sekretariat Daerah				
	- <i>Belanja Tidak Langsung</i>	0.00	0.00	0.00	
	- <i>Belanja Langsung</i>	0.00	676,932,400.00	676,932,400.00	
2.11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah				
2.11.2.11.01	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah				
	- <i>Belanja Tidak Langsung</i>	4,245,492,000.00	5,068,254,000.00	822,762,000.00	
	- <i>Belanja Langsung</i>	5,553,828,400.00	4,832,504,789.00	(721,323,611.00)	
2.12	Penanaman Modal				
2.12.2.12.01	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu				
	- <i>Belanja Tidak Langsung</i>	3,101,500,000.00	3,040,126,000.00	(61,374,000.00)	
	- <i>Belanja Langsung</i>	1,749,619,000.00	1,749,619,000.00	0.00	
2.13	Kepemudaan dan Olahraga				
2.13.2.13.01	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga				
	- <i>Belanja Tidak Langsung</i>	3,256,456,000.00	2,539,625,000.00	(716,831,000.00)	
	- <i>Belanja Langsung</i>	3,978,158,000.00		759,290,000.00	

			4,737,448,000.00		
2.16	Kebudayaan				
2.16.2.16.01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan				
	- Belanja Tidak Langsung	0.00	0.00	0.00	
	- Belanja Langsung	3,251,273,800.00	3,206,548,800.00	(44,725,000.00)	
2.16.2.16.02	Sekretariat Daerah				
	- Belanja Tidak Langsung	0.00	0.00	0.00	
	- Belanja Langsung	406,050,000.00	584,255,000.00	178,205,000.00	
2.17	Perpustakaan				
2.17.2.17.01	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan				
	- Belanja Tidak Langsung	2,898,274,000.00	2,707,190,000.00	(191,084,000.00)	
	- Belanja Langsung	2,107,037,000.00	2,111,560,000.00	4,523,000.00	
2.18	Kearsipan				
2.17.2.17.01	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan				
	- Belanja Tidak Langsung	0.00	0.00	0.00	
	- Belanja Langsung	128,122,000.00	130,801,000.00	2,679,000.00	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	70,501,123,650.00	82,168,228,561.00	11,667,104,911.00	
3.01	Kelautan dan Perikanan				
3.01.3.01.01	Dinas Perikanan				
	- Belanja Tidak Langsung	3,668,705,000.00	3,122,170,000.00	(546,535,000.00)	
	- Belanja Langsung	14,290,903,000.00	14,299,293,000.00	8,390,000.00	
3.02	Periwisata				
3.02.3.02.01	Dinas Pariwisata				
	- Belanja Tidak Langsung	3,298,591,000.00	3,212,800,000.00	(85,791,000.00)	
	- Belanja Langsung	6,988,919,000.00	7,201,969,000.00	213,050,000.00	
3.03	Pertanian				
3.03.3.03.01	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan				
	- Belanja Tidak Langsung	4,663,054,000.00	4,969,685,000.00	306,631,000.00	
	- Belanja Langsung	6,677,065,850.00	8,379,929,350.00	1,702,863,500.00	
3.03.3.03.02	Dinas Ketahanan Pangan				
	- Belanja Tidak Langsung	0.00	0.00	0.00	
	- Belanja Langsung	519,575,200.00	113,700,000.00	(405,875,200.00)	
3.03.3.03.02	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan			0.00	
	- Belanja Tidak Langsung	3,452,124,000.00	3,810,859,000.00	358,735,000.00	
	- Belanja Langsung	6,776,777,000.00	6,794,976,000.00	18,199,000.00	
3.04	Perdagangan				
3.04.3.04.01	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah				
	- Belanja Tidak Langsung	0.00	0.00	0.00	
	- Belanja Langsung	18,190,821,600.00	27,935,871,211.00	9,745,049,611.00	
3.04.3.04.03	Sekretariat Daerah				
	- Belanja Tidak Langsung	0.00	0.00	0.00	
	- Belanja Langsung	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	

3.06	Energi dan Sumber Daya Mineral				
	Sekretariat Daerah				
	- <i>Belanja Tidak Langsung</i>	0.00	0.00	0.00	
	- <i>Belanja Langsung</i>	985,000,000.00	1,185,000,000.00	200,000,000.00	
3.07	Perindustrian				
3.07.3.04.01	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah				
	- <i>Belanja Tidak Langsung</i>	0.00	0.00	0.00	
	- <i>Belanja Langsung</i>	328,628,000.00	481,016,000.00	152,388,000.00	
3.08	Ketransmigrasian				
3.08.2.01.01	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi				
	- <i>Belanja Tidak Langsung</i>	0.00	0.00	0.00	
	- <i>Belanja Langsung</i>	610,960,000.00	610,960,000.00	0.00	
4	URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	91,502,416,000.00	89,351,452,600.00	(2,150,963,400.00)	
4.01	Pemerintahan Umum				
4.01.4.01.01	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah				
	- <i>Belanja Tidak Langsung</i>	6,964,592,000.00	10,118,433,000.00	3,153,841,000.00	
	- <i>Belanja Langsung</i>	0.00	0.00		
4.01.4.01.02	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				
	- <i>Belanja Tidak Langsung</i>	762,105,000.00	729,357,000.00	(32,748,000.00)	
	- <i>Belanja Langsung</i>	0.00	0.00	0.00	
4.01.4.01.03	Sekretariat Daerah				
	- <i>Belanja Tidak Langsung</i>	13,672,554,000.00	10,477,622,000.00	(3,194,932,000.00)	
	- <i>Belanja Langsung</i>	17,560,889,000.00	18,822,576,600.00	1,261,687,600.00	
4.01.4.01.04	Sekretariat DPRD				
	- <i>Belanja Tidak Langsung</i>	3,227,389,000.00	2,446,964,000.00	(780,425,000.00)	
	- <i>Belanja Langsung</i>	10,735,690,000.00	11,085,690,000.00	350,000,000.00	
4.01.4.01.05	Inspektorat Kabupaten				
	- <i>Belanja Tidak Langsung</i>	3,874,974,000.00	3,531,345,000.00	(343,629,000.00)	
	- <i>Belanja Langsung</i>	3,676,950,000.00	3,677,419,000.00	469,000.00	
4.02	Penunjang Pemerintahan Umum				
4.02.4.02.01	Kecamatan Arut Selatan				
	- <i>Belanja Tidak Langsung</i>	8,181,266,000.00	7,145,619,000.00	(1,035,647,000.00)	
	- <i>Belanja Langsung</i>	2,575,040,000.00	2,582,109,000.00	7,069,000.00	
4.02.4.02.02	Kecamatan Arut Utara				
	- <i>Belanja Tidak Langsung</i>	2,592,691,000.00	2,236,756,000.00	(355,935,000.00)	
	- <i>Belanja Langsung</i>	1,272,260,000.00	1,275,185,000.00	2,925,000.00	
4.02.4.02.03	Kecamatan Kumai				
	- <i>Belanja Tidak Langsung</i>	4,461,680,000.00	3,858,436,000.00	(603,244,000.00)	
	- <i>Belanja Langsung</i>	1,182,042,000.00	1,187,518,000.00	5,476,000.00	
4.02.4.02.04	Kecamatan Kotawaringin Lama				
	- <i>Belanja Tidak Langsung</i>	3,426,191,000.00	3,029,021,000.00	(397,170,000.00)	
	- <i>Belanja Langsung</i>	1,597,268,000.00	1,603,580,000.00	6,312,000.00	
4.02.4.02.05	Kecamatan Pangkalan Lada				

	- <i>Belanja Tidak Langsung</i>	1,639,838,000.00	1,650,909,000.00	11,071,000.00	
	- <i>Belanja Langsung</i>	1,175,023,000.00	1,175,023,000.00	0.00	
4.02.4.02.06	Kecamatan Pangkalan Banteng				
	- <i>Belanja Tidak Langsung</i>	1,805,958,000.00	1,599,874,000.00	(206,084,000.00)	
	- <i>Belanja Langsung</i>	1,118,016,000.00	1,118,016,000.00	0.00	
5	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	236,190,626,500.00	229,642,774,000.00	(6,547,852,500.00)	
5.01	Perencanaan				
5.01.5.01.01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah				
	- <i>Belanja Tidak Langsung</i>	3,190,077,000.00	3,283,340,000.00	93,263,000.00	
	- <i>Belanja Langsung</i>	6,280,804,000.00	6,284,741,000.00	3,937,000.00	
5.01.5.01.02	Sekretariat Daerah				
	- <i>Belanja Tidak Langsung</i>	0.00		0.00	
	- <i>Belanja Langsung</i>	1,317,500,000.00	1,266,250,000.00	(51,250,000.00)	
5.02	Keuangan				
5.02.5.02.01	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah				
	- <i>Belanja Tidak Langsung</i>	182,946,092,500.00	179,690,276,000.00	(3,255,816,500.00)	
	- <i>Belanja Langsung</i>	0.00	0.00	0.00	
5.02.5.02.02	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah				
	- <i>Belanja Tidak Langsung</i>	15,045,450,000.00	11,700,499,000.00	(3,344,951,000.00)	
	- <i>Belanja Langsung</i>	7,073,079,000.00	7,178,783,000.00	105,704,000.00	
5.02.5.02.03	Badan Pendapatan Daerah				
	- <i>Belanja Tidak Langsung</i>	6,199,364,000.00	5,674,554,000.00	(524,810,000.00)	
	- <i>Belanja Langsung</i>	4,767,286,000.00	4,772,007,000.00	4,721,000.00	
5.03	Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan				
5.03.5.03.01	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan				
	- <i>Belanja Tidak Langsung</i>	3,430,395,000.00	3,275,610,000.00	(154,785,000.00)	
	- <i>Belanja Langsung</i>	5,940,579,000.00	6,516,714,000.00	576,135,000.00	

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017 ini merupakan acuan dan pedoman dalam rangka menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P), bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat untuk Tahun Anggaran 2017.

Penyusunan berbagai dokumen tersebut didahului dengan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017.

Pedoman ini disusun agar setiap SKPD dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan umum, tugas pembangunan dan tugas pelayanan kepada masyarakat dapat terlaksana secara holistik dan berkelanjutan, dengan menjalankan fungsi manajemen yang terintegrasi dan selalu mengutamakan koordinasi demi terlaksananya pembangunan yang menyeluruh, berkesinambungan dan berkelanjutan serta tepat sasaran.

Koordinasi pembangunan tersebut dilakukan secara lintas sektor dan lintas daerah baik antar Kabupaten, Provinsi maupun Pusat dengan berpihak pada pemangku kepentingan pembangunan serta berlandaskan pada prinsip untuk mencapai kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Selain itu perencanaan pembangunan secara hirarki telah ditempuh dengan berbagai pihak yang berintikan proses komunikasi antar lembaga perencana dan antar lembaga perencana dengan pemangku kepentingan pembangunan dilakukan melalui forum regular yang telah terprogram.

Penyusunan RKPD Perubahan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017 pada akhirnya akan menjadi ukuran kinerja bagi SKPD yang terangkum dalam Rencana Kerja SKPD, dengan maksud agar pelaksanaan pembangunan dapat memenuhi harapan dan aspirasi masyarakat serta dapat memberikan pemecahan masalah mendesak bagi masyarakat pada tahun yang direncanakan.

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT



NURHIDAYAH

